



LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) TAHUN 2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

<https://bkad.slemankab.go.id>



bkad@slemankab.go.id



(0274) 866039



Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta



LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (BKAD)

TAHUN 2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

<https://bkad.slemankab.go.id>

bkad@slemankab.go.id

(0274) 866038

Jalan Padasmya, Betan, Tridadi, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahunan. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BKAD dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran. Perjanjian Kinerja antara Kepala BKAD dengan Bupati, memuat pertanggungjawaban program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja BKAD dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk evaluasi internal dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 meliputi: capaian kinerja indikator indeks pengelolaan keuangan daerah 125%, Indeks Kepuasan Masyarakat 104,22% dan predikat AKIP 100%. Pengukuran kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan data capaian kinerja tahun sebelumnya. Keseluruhan capaian indikator kinerja tahun 2023 menunjukkan peningkatan jika dibanding capaian indikator kinerja tahun 2022.

LKjIP ini turut menginformasikan Program yang mendukung tujuan/sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, berikut bukti pendukung berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari 2 (dua) tujuan/sasaran tercapai efisien. Alokasi anggaran yang tersedia untuk

pencapaian tujuan/sasaran sebesar Rp617.401.331.549,00 terealisasi sebesar Rp593.564.299.616,00 atau sebesar 96,14% sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 105,03%.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya, ditindaklanjuti secara berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah 2023".

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperlakukan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai salah satu entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah barang tentu wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman, 16 Februari 2024
Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



HARIS SUTARTA, S.E., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Profil Singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah	8
1.2 Isu Strategis	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2022	26
2.1.1 Visi	26
2.1.2 Misi	26
2.1.3 Tujuan	27
2.1.4 Sasaran	27
2.1.5 Strategi	28
2.2 Indikator Kinerja Utama	29
2.3 Perjanjian Kinerja BKAD	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama	33
3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	39
3.2 Analisis Pengukuran Kinerja	41
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	49
3.4 Analisis Program/Kegiatan	51
3.5 Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional "Pengentasan Kemiskinan"	68
BAB VI PENUTUP	71
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023	71
4.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022	77
LAMPIRAN	79
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	80
Lampiran 2 Daftar Prestasi, beserta dokumentasi piagam/sertifikat, dan dokumentasi seremonialnya	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan	27
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran	28
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama BKAD	30
Tabel 2.4 Program dan Indikator Program	30
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BKAD	32
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD	33
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indeks Tahun 2023	37
Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja	40
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1	41
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan 1 Tahun 2021 s.d 2023	41
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1	43
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 s.d 2023	44
Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2	46
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2021 s.d 2023	46
Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2	48
Tabel 3.11 Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2021 dan 2023	48
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	49
Tabel 3.13 Capaian indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2023	67
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Penyaluran Dana Penguatan Modal Tahun 2023	69
Tabel 3.15 Pengelolaan Dana Penguatan Modal	70
Tabel 4.1 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	22
Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Stadion Maguwoharjo	22
Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal	23
Gambar 1.4 Grafik Pegawai Jumlah Berdasarkan Golongan	24
Gambar 1.5 Grafik Pegawai Jumlah Berdasarkan Pendidikan	24
Gambar 3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Website Pemda	36
Gambar 3.2 Grafik Penyerapan Anggaran	36
Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kemandirian Daerah	37
Gambar 3.4 Rapat Koordinasi Internal	39
Gambar 3.5 Screen Shoot Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Website BKAD	43
Gambar 3.6 Ruang Pelayanan BKAD	47
Gambar 3.8 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian SKP dan PPKP	54
Gambar 3.9 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat	61
Gambar 3.10 Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan	62
Gambar 3.11 Workshop Pengelolaan Barang Milik Daerah	64
Gambar 3.12 Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang No 1 Tahun 2022	66
Gambar 3.13 Kegiatan Pemantauan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	67
Gambar 4.1 Grafik Capaian Kinerja BKAD Tahun 2021 s.d 2023	71
Gambar 4.2 Grafik Dana Penguatan Modal yang tersalur	72
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Kelompok Penerima	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Profil Singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1) dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan.
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c) Pelaksanaan urusan umum.
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian.

- e) Pelaksanaan urusan keuangan.
- f) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- g) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- h) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d) Pengelolaan pelengkapan, keamanan dan kebersihan.
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.
- f) Pengelolaan dokumentasi dan informasi.
- g) Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.
- h) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
- i) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan.
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
- c) Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan.
- d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.

- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan Inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

a) Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
- c) Pelaksanaan pendataan pajak daerah;
- d) Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah;
- e) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah;
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

1. Kelompok Substansi Pendaftaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendaftaran.

- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi.
- e) Pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah.
- f) Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian SPPT PBB; dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendaftaran.

2. Kelompok Substansi Pendataan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendataan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.
- f) Pelaksanaan administrasi benda berharga dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendataan.

3. Kelompok Substansi Penetapan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penetapan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan analisis pajak daerah.
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penetapan.

d. Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- d) Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
- e) Pengembangan pendapatan asli daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Penagihan

a. Tugas

Menyiapkan beban penagihan penerimaan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi penagihan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan, dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penagihan.

2. Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
- b) Rumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah dan
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

3. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan perkembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
- Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
- Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

e. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah

b. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
- Perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah.
- Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah.
- Pelaksanaan pengelolaan kas daerah, dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1. Kelompok Substansi belanja

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja daerah.

b. Fungsi

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Belanja Gaji.
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembayaran belanja daerah.
- Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah.
- Pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah, dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji.

2. Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah
- b) Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kas Daerah
- c) Pelaksanaan penatausahaan kas daerah
- d) Pelaksanaan pengendalian kas daerah dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pengelolaan Kas Daerah

f. Bidang Anggaran

a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran
- b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah
- c) Pelaksanaan analisis anggaran daerah
- d) Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah
- e) Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Analisis Anggaran

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Analisis Anggaran
- b) Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah
- d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan)
- e) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah
- f) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah

- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Analisis Anggaran.

2. Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.
- c) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
- e) Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.
- f) Penyusunan informasi penganggaran daerah dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran.

3. Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah.
- c) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a) Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah.

- d) Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.
- e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
- f) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi.

2. Kelompok Substansi Pelaporan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelaporan
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah dan pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah
- c) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah.
- d) d pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pelaporan.

h. Bidang Aset

a) Tugas

Melaksanakan dan membina pengelolaan barang milik daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah.

- c) Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan barang milik daerah.
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- d) Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- f) Pengurusan status hukum barang daerah dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.

2. Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.

- c) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- d) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- f) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- g) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah dan
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

3. Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

1. **Unit Pelaksana Teknis Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

(1) UPT Stadion Maguwoharjo

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga lainnya.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya;
- c) Pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olah Raga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- d) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- e) pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- f) pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- g) pelaksanaan keamanan internal sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- h) pemasaran dan kerjasama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- i) pelaksanaan ketatausahaan;
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari

1. Kepala UPTD

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawain, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD, dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Stadion Maguwahario sesuai dengan ketrampilan/keahlian.

(2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
- c) pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
- d) pelayanan informasi dana penguatan modal;
- e) pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
- f) pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
- g) pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
- h) pelaksanaan ketatausahaan;
- i) evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja, dan

- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

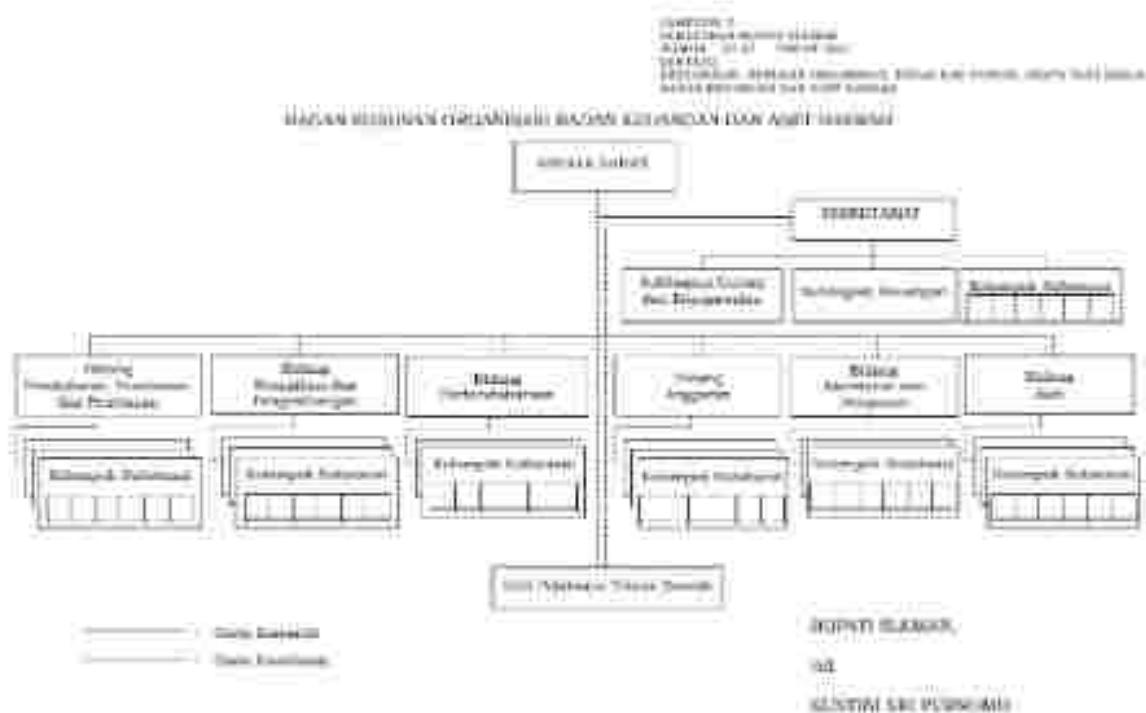
- a. Kepala UPTD
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
 - d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
 - g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
 - h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
 - i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maouwohario

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DATA PENGANTAR MODAL



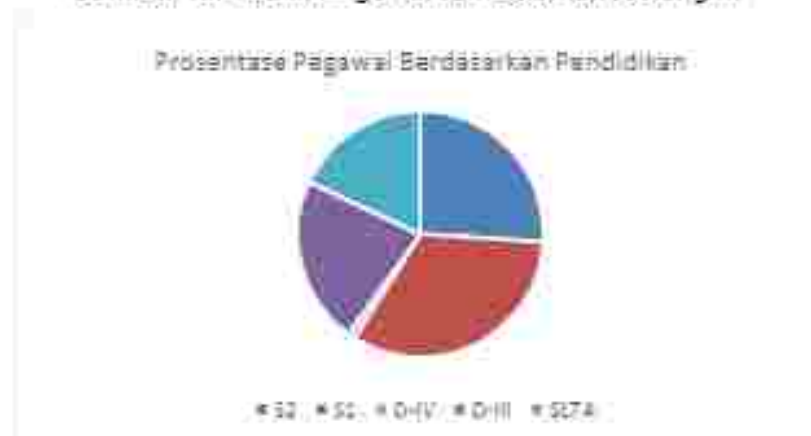
Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumberdaya manusia / pegawai dengan beberapa klasifikasi. Sampai dengan Desember 2023 total sumber daya manusia (PNS) di BKAD tercatat 88 orang. Pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang (44%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 49 orang (56%).

Jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV berjumlah 18 orang (20%), Golongan III berjumlah 49 orang (56%), dan Golongan II berjumlah 21 orang (24%). Sedangkan berdasar klasifikasi pendidikan, jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 berjumlah 23 orang (26%), S-1 berjumlah 29 orang (33%), D-IV berjumlah 1 orang (1%), D-III berjumlah 19 orang (22%), SLTA berjumlah 16 orang (18%), SLTP berjumlah 0 orang (0%), dan SD berjumlah 0 orang (0%). Jumlah pejabat struktural sebanyak 14 orang yang terdiri dari 6 pejabat laki-laki dan 8 pejabat perempuan. Jumlah pejabat struktural tersebut meliputi 1 pejabat eselon IIb, 1 pejabat eselon IIIb, 6 pejabat eselon IIIa, 4 pejabat eselon IVa dan 2 pejabat eselon IVO.



Gambar 1.4 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1.5 Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.2. Isu Strategis

Berdasarkan Aspek Strategis sebagaimana diuraikan diatas BKAD memiliki aspek strategis yakni menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Keuangan, yakni tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa lima tahun, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman "Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong". BKAD sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui misi "Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat".

Misi tersebut dilaksanakan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2023

Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan antara Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) perangkat daerah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tidak terdapat tiga tahapan perencanaan yang harus terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional maupun global dengan tetap berada pada tatanan sistem perencanaan.

Pada tahap ini dipastikan bahwa Rencana Strategis paling tidak harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam kurun waktu 2021-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman.

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah:

"TERWUJUDNYA SLEMAN SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GOTONG ROYONG"

2.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjatahan visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai tugas pokok dan fungsi karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Dari 5 (lima) misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

Misi 1:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sejalan dengan visi dan misi tujuan BKAD Kabupaten Sleman yang telah dirumuskan adalah:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	8	8	8	8	8	8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Angka hasil survey IKM yang dilakukan perangkat daerah	Indeks	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	B	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AiQP	Hasil Penilaian Inspektorat	Predikat	A	A	A	A	A	A

2.1.5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, kebijakan dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah:

- Meningkatkan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD
- Meningkatkan terfili administrasi penatausahaan keuangan BKAD
- Mengoptimalkan teknologi informasi dan sosial media untuk meningkatkan pelayanan BKAD
- Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
- Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD
- Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah
- Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah
- Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah
- Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Intensifikasi pajak daerah

- p) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- q) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah
- r) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD

2.2. Indikator kinerja Utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas Perangkat Daerah selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dan seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama BKAD tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021-2026 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama BKAD Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama BKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Rumus Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Nilai	81,53	Angka hasil survey, KM yang dilakukan BKAD
2	Predikat Akip	Indeks	A	Hasil penilaian dari Inspektorat
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan diperlukan beberapa program pendukung. Berikut adalah program dan indikator kinerja program pendukung tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4 Program dan Indikator Program

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Rumus Perhitungan
1	Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang memenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah layanan pemenuhan sarana prasarana dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen anggaran yang dibuat tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen anggaran yang dibuat tepat waktu dibagi seluruh dokumen anggaran yang dibuat dikalikan 100
		Persentase kelengkapan waktu dalam pelaksanaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah dokumen RP2D yang diterbitkan dan laporan pengurusan kas daerah yang tepat waktu dibagi dengan jumlah RP2D yang seharusnya diterbitkan dan laporan pengurusan kas daerah yang tepat waktu dikalikan 100 persen
		Persentase kelengkapan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Raport pertanggungjawaban APBD yang dibuat tepat waktu dibagi dengan Raport pertanggungjawaban

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Rumus Perhitungan
									APBD disahkan 100 persen
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang terdistribusikan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	82%	84%	86%	88%	90%	92%	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	4,18	3,98	3,49	3,78	3,00	3,25	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi penerimaan pajak dan retribusi daerah n-1 dibagi dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dikalikan 100%
		Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	76,67	78,6	78,9	80,06	80,1	80,2	Indeks kepuasan layanan pajak yang diberikan dan hasil survei terhadap waktu pajak daerah

2.3. Perjanjian Kinerja BKAD 2023

Perjanjian kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BKAD (pengguna anggaran entitas pelaporan) dengan Bupati Sleman. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BKAD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan BKAD. Perjanjian kinerja BKAD 2023 memuat Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Penyusunan perjanjian kinerja ini dimulai dengan merumuskan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Tujuan Umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2023 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Perjanjian Kinerja BKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
2.		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

3.1. Capaian Kinerja BKAD Tahun 2023

Penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Capaian kinerja BKAD dapat dilihat pada realisasi Indikator Kinerja Utama dan realisasi perjanjian kinerja.

3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama BKAD tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Adapun realisasi indikator kinerja utama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Tingkat Keberhasilan	Target Jangka Menengah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1	Indeks Pembangunan & Keberlanjutan Daerah	Index	B	B	C	A	100%	Realisasi Berimbang 5,21 atau sebesar 8,20%	B	Suatu ukuran yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan dan indikator untuk menilai kualitas kinerja organisasi berdasarkan hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator yang ditetapkan.	Rata-rata Indeks Pembangunan dan Keberlanjutan yang ditetapkan di Kabupaten dan Daerah Kerja

[illegible]

- a. Indikator kinerja utama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah target indikator adalah B terrealisasi A sehingga capaiannya 125%. Definisi operasional indeks pengelolaan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun

2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 3 (tiga) kategori hasil pengukuran yaitu baik, perlu perbaikan dan sangat perlu perbaikan. Tiga kategori hasil pengukuran tersebut pada renstra BKAD disetarakan menjadi kategori baik sebagai A, kategori perlu perbaikan sebagai B dan sangat perlu perbaikan sebagai C. Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dilakukan oleh pemerintah provinsi. Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Keenam dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini kesesuaian diukur dari kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran. Mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD. Dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS. Dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD.

2) Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, untuk fungsi Kesehatan minimal sebesar 10% diluar gaji dan serta alokasi untuk infrastruktur dan dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

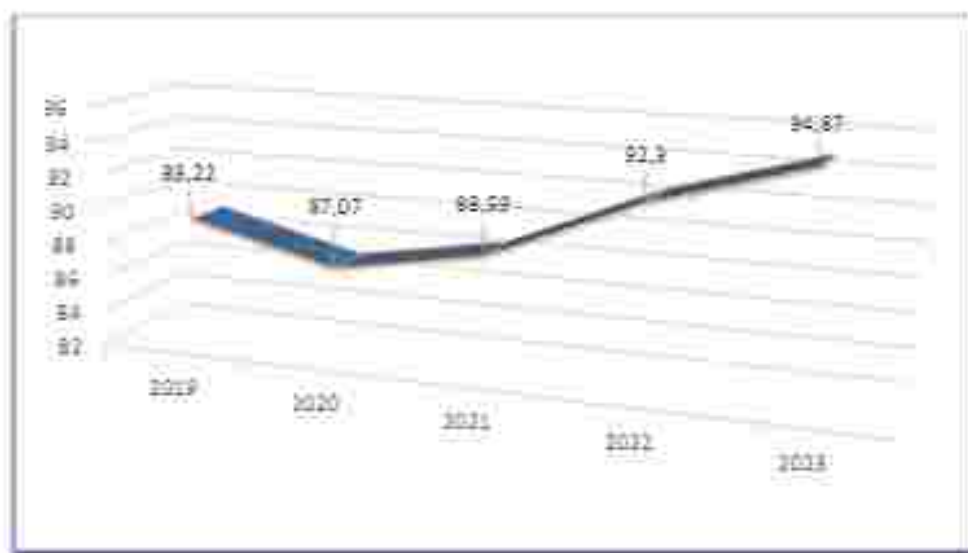
Pada dimensi ini pemerintah daerah dituntut ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran baik itu pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas Pemerintah daerah dan opini BPK.



Gambar 3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Website Pemda

4) Penyerapan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.



Gambar 3.2 Grafik Penyerapan Anggaran

5) Kondisi Keuangan Daerah

Dimensi ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif. Indeks dimensi kondisi keuangan

daerah dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah. Keenam indikator tersebut adalah a) kemampuan keuangan daerah, b) fleksibilitas keuangan, c) solvabilitas operasional, d) solvabilitas jangka pendek, e) solvabilitas jangka panjang dan f) solvabilitas layanan.



Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kemandirian Daerah

6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Pada dimensi ini, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan yang dilakukan pada tahun 2023 atas pengelolaan keuangan tahun 2022 adalah kategori A (baik) dengan nilai indeks total sebesar 80,06. Dibanding capaian tahun 2022 hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 meningkat sebesar 5,23 atau sebesar 6,96%. Kenaikan dan penurunan hasil pengukuran dari tiap-tiap dimensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indeks Tahun 2023

No	Pengukuran	Nilai Maksimal	Nilai Perolehan 2022	Nilai Perolehan 2023	Naik (Turun)
1	Dimensi 1	15,00	8,89	10,69	3,80
2	Dimensi 2	20,00	20,00	20,00	-
3	Dimensi 3	15,00	11,37	13,45	2,08
4	Dimensi 4	25,00	15,00	15,00	-
5	Dimensi 5	15,00	6,67	5,92	(0,65)
6	Dimensi 6	15,00	15,00	15,00	-
			74,93	80,06	5,23

Indikator Indeks pengelolaan keuangan daerah ini didukung 3 (tiga) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program Pengelolaan Keuangan Daerah melalui 4 (empat) kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung indikator ini adalah sebesar Rp 520.967.807.053,00 terealisasi sebesar Rp 504.269.007.017,00 atau sebesar 96,79%. Total anggaran termasuk untuk hibah dan transfer ke desa sebagai fungsi Bendahara Umum Daerah dan untuk kebutuhan penanganan darurat.

- b. Indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat dengan target indikator sebesar 81,50 terealisasi sebesar 84,94 sehingga capaiannya 104,22%. Dibanding capaian tahun 2022, indikator ini meningkat sebesar 1,91 atau meningkat 2,30%. Capaian indikator ini didukung program penunjang urusan pemerintah melalui 4 kegiatan. Keempat kegiatan tersebut adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Total anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar Rp 56.957.619.170,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.983.100.585,50 atau sebesar 96,53%.

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survei kepada pengguna jasa di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah baik di sekretariat maupun di 6 (enam) bidang. Responden dipilih secara acak (random) sampling yang ditentukan dengan cakupan jenis pelayanan masing-masing unit pelayanan publik pada bidang-bidang dan sekretariat BKAD. Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan BKAD dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) jenis kuisisioner yaitu kuisisioner *standard* dan kuisisioner rapat. Survei dilaksanakan tiap semester pada tiap-tiap unit layanan. Pada semester pertama tahun 2023 atas pelayanan kepada pengguna jasa BKAD diperoleh indeks sebesar 84,35. Sedangkan dari hasil survei semester 2 (dua) diperoleh hasil indeks sebesar 85,53. Dari kedua hasil survei tersebut kemudian dijumlah dan dibagi 2 (dua) untuk menentukan indeks IKM BKAD.

- c. Indikator Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan target indikator nilai A dengan target nilai 83 terealisasi dengan nilai 84 masuk kategori A sehingga capaiannya 101,20%. Predikat AKIP diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Dalam melakukan evaluasi atas LKJIP perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman berdasarkan pada aturan dari Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Atas penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Sleman, LKJIP BKAD memperoleh nilai sebesar 84. Nilai tersebut masuk dalam kategori BB. Sedangkan target yang tercantum pada renstra adalah A dengan nilai 83. Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi atas LKJIP tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023. Dibanding capaian tahun sebelumnya, indikator ini meningkat sebesar 7,05 atau sebesar 9,17%. Capaian indikator ini didukung program penunjang urusan pemerintah melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator utama Predikat AKIP adalah sebesar Rp 39.420.004.826,00 terealisasi sebesar Rp 34.026.582.273,50 atau sebesar 86,32%.



Gambar 3.4 Rapat Koordinasi Internal

3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2023 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2023, realisasi perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja

No.	Tujuan	Isi/Aspek	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Definisi Keberhasilan	Alasan Penolakan
1.	Meningkatkan produktivitas pelayanan keagenan daerah		Index Penguasaan Wilayah Kerja Daerah	A	A	100%	Seluruh unsur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara dan indikator untuk menilai kualitas kinerja terdapat keagenan daerah yang tidak sesuai, kemudian dari indikator dalam periode tertentu	Nilai tidak Penguasaan Wilayah Kerja yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan keagenan daerah	Meningkatkan jumlah/luas penguasaan keagenan daerah	Index Penguasaan Wilayah Kerja Daerah	B	A	100%	Seluruh unsur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara dan indikator untuk menilai kualitas kinerja terdapat keagenan daerah yang tidak sesuai, kemudian dari indikator dalam periode tertentu	Nilai tidak Penguasaan Wilayah Kerja yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah		Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00	94,94	104,22%	Index yang diberikan dari hasil kuesioner masyarakat yang dilakukan terhadap unit yang bersangkutan sebelum, selama, dan setelah pelayanan publik dengan menggunakan instrumen dan melakukan survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan BKAD
4.	Meningkatkan jumlah/luas kerja pemerintah daerah		Produk L&P	A	A	100%	Produk yang diberikan oleh Kementerian KEM RB atau Laporan Kinerja yang telah dan dipaparkan luas dan luas yang diharapkan sesuai dengan indikator pemerintah atau berdasarkan indikator: Perencanaan laporan kinerja sesuai, pencapaian kinerja dan evaluasi serta pengembangan, pelaksanaan sesuai rencana, hasil, analisis terhadap pencapaian kinerja, Produk AMP sesuai dan	

3.2. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 1 "Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah"

Hasil capaian kinerja tahun 2023 tujuan 1 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 125%. Target indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 adalah B dan terealisasi A. Secara ringkas hasil capaian kinerja tujuan 1 dapat dilihat pada tabel 3.4. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	A	125

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan 1 Tahun 2021 s.d 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022	2023		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	A	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra 125%	B (tahun ke-5)

Tujuan "Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan "Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" sebesar Rp 520.967.807.053,00 terealisasi sebesar Rp 504.269.007.017,00 atau 96,79% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,79% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 125%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

- b) Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan *spending mandstary* dalam pengalokasian belanja pada APBD
- d) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan.
- e) Kondisi perekonomian membaik sehingga penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.
- f) Adanya supervisi dari pemerintah pusat melalui Komite Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.
- g) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pencapaian indikator tujuan tentunya menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan adalah:

- a) Sistem pengelolaan keuangan menggunakan doble sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendal teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
- b) Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- c) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan.

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
- b) Data-data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.

- c) Menyesuaikan peraturan-peraturan akibat perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi



Gambar 3.5 Screen Shoot Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada website BKAD

Sasaran 1 "Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah"

Hasil capaian kinerja tahun 2023 sasaran 1 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 109.67 persen. Target indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 adalah B (73) dan ierealisasi A (80.06). Secara ringkas hasil capaian kinerja tujuan 1 dapat dilihat pada tabel 3.6. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nila	B	A	128.00

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 s.d 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022	2023		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	A	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra 125(%)	B (tahun ke-5)

Sasaran "Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran "Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" sebesar Rp 520.967.807.053,00 terealisasi sebesar Rp 504.269.007.017,00 atau 96,79% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,79% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 125%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
- Komitmen pimpinan untuk melaksanakan *spending mandatory* dalam pengalokasian belanja pada APBD.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan.
- Kondisi perekonomian membaik sehingga penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.
- Adanya Supervisi dari pemerintah pusat melalui Komite Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.

- g) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pencapaian indikator sasaran tentunya menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:

- a) Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendal teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
- b) Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- c) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian sasaran:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
- b) Data-data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.
- c) Menyesuaikan peraturan-peraturan akibat perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Tujuan 2 "Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah"

Hasil capaian kinerja tahun 2023 tujuan 2 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 101,2 persen. Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat daerah tahun 2023 adalah nilai Indeks sebesar 81,50 dan terealisasi 84,94. Realisasi indeks tersebut adalah rerata dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh BKAD semester 1 dan semester 2. IKM semester 1 sebesar 84,35 dan semester 2 sebesar 85,53 sehingga diperoleh rerata 84,94. Secara ringkas hasil capaian kinerja tujuan 2 dapat dilihat pada tabel 3.8. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja tujuan 2

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,60	84,94	104,22

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2022 s.d 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022	2023		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,26	83,03	84,94	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra 103,37 (%)	82,26 (tahun ke-5)

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah" tersebut dicapai melalui program penunjang urusan pemerintah.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan "Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" sebesar Rp 56.957.619.170,00 terealisasi sebesar Rp 54.963.100.585,50 atau 96,53% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,53% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 104,22%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut:

- Teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah untuk menggunakan jasa layanan.
- Adanya komitmen pimpinan berikut jajarannya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
- Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek survey kepuasan masyarakat sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.
- Adanya survey kepuasan pengguna layanan oleh pihak independen telah mendorong perangkat daerah untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan.
- Telah ditetapkannya keputusan Bupati Nomor 70.1/Kep.KDH/A/2015 tentang Indikator Kinerja Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian indikator tujuan tentunya menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya ruang untuk memenuhi standar ruang pelayanan yang baik yang digunakan untuk ruang laktasi, ruang bermain anak dan pojok baca.
- b) Tingkat pemahaman petugas pelayanan belum merata sehingga berpengaruh pada informasi yang disampaikan.
- c) Kemampuan petugas dalam melayani masyarakat belum merata.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran:

- a) Penataan ulang ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat pengguna layanan.
- b) Bimbingan teknis bagi petugas terkait publik speaking untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan informasi terkait pelayanan.
- c) Bimbingan teknis bagi petugas pelayanan terkait pelayanan prima dan peningkatan integritas petugas.



Gambar 3.6 Ruang Pelayanan BKAD

Sasaran 2 "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Hasil capaian kinerja tahun 2023 sasaran 2 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 100 persen. Target indikator predikat AKIP tahun 2023 adalah A dan terealisasi A. Secara ringkas hasil capaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.10. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.11.

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja tujuan 2

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Predikat AKIP	Nilai	A	A	100

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2022	2023	2023		
1	Predikat AKIP	Nilai	A	BB	A	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir rekrutasi 100%	A (tahun ke-5)

Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" tersebut dicapai melalui program penunjang urusan pemerintah.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan "Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" sebesar Rp39.420.004.826.00 terealisasi sebesar Rp34.026.582.273,50 atau 86,32% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 86,32% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

- Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja.
- Komitmen pimpinan beserta jajaran.
- Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan.
- Partisipasi masyarakat melalui kanal-kanal aduan sehingga mendorong meningkatkan akuntabilitas.

Dalam pencapaian indikator sasaran menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:

- Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan yang telah direncanakan.
- Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian sasaran:

- a) Meningkatkan koordinasi terkait implementasi sistem
- b) Menyesuaikan peraturan yang berlaku

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pada subbab ini diuraikan target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BKAD sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan-Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		109,87	520.987.807.053,00	504.269.007.017,00	96,79	Efisien
2		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	109,87	520.987.807.053,00	504.269.007.017,00	96,79	Efisien
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		101,20	56.957.619.170,00	54.983.100.585,50	96,53	Efisien
4		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	104,22	39.420.004.328,00	34.026.583.273,60	86,32	Efisien
J U M L A H				617.245.431.049,00	593.278.699.876,00	96,10	Efisien

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan BKAD tahun 2022, untuk mencapai 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran dianggarkan sebesar Rp617.345.431.049,00 dan terealisasi sebesar Rp593.278.889.876,00 atau 96,10%.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp504.269.007.017,00 dari anggaran sebesar Rp617.345.431.049,00 atau 96,10%. Realisasi keuangan sebesar 96,10% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 109,67%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b) Pengoptimalan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan sehingga koordinasi lebih mudah dilaksanakan.
- c) Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
- d) Adanya Kebijakan pembayaran non tunai.
- e) Sistem pengadaan barang dan jasa yang semakin transparan melalui fitur-fitur yang dapat diakses publik.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp381.885.481.436,00 dari anggaran sebesar Rp413.061.478.037,01 atau 92,45%. Realisasi keuangan sebesar 92,45% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b) Pengoptimalan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan.

- c) Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp54.983.100.585,50 dari anggaran sebesar Rp56.957.619.170,00 atau 96,53%. Realisasi keuangan sebesar 96,53% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 104,22%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan BKAD yang dapat dilihat dari capaian nilai indeks kepuasan masyarakat.
- b) Penerapan kebijakan *smart regency* dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- c) Tingginya tingkat kepatuhan terhadap standar prosedur operasional.

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp34.026.582.273,50 dari anggaran sebesar Rp39.420.004.826,00 atau 86,32%. Realisasi keuangan sebesar 86,32% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,20%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b) Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan.
- c) Komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja.

Pada tahun 2023 telah dilakukan refocusing anggaran dengan total refocusing sebanyak Rp 2.068.053.480,00 dengan rincian refocusing dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp 1.695.553.480,00 dan belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 1.378.353.200,00.

3.4. Analisis Program/Kegiatan

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tentunya didukung program dan kegiatan. Terdapat 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan BKAD dalam rangka mencapai indikator tujuan dan sasaran. Berikut analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan BKAD.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretariat BKAD, didukung 5 (lima) kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp 98.377.623.996,00 terealisasi sebesar Rp 89.009.682.859,00 atau sebesar 92,35%.

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota ada 2 yaitu persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana kerja, baik pengadaannya maupun pemeliharaan atas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kerja meliputi gedung kantor, kendaraan dinas serta perlengkapan dan peralatan kantor. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya layanan administrasi perkantoran BKAD. Administrasi perkantoran terdiri dari layanan administrasi keuangan, layanan makan dan minum rapat, layanan koordinasi dan konsultasi, layanan langganan, layanan jasa keamanan dan kebersihan, layanan administrasi kepegawaian dan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD.

Dengan demikian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 berhasil dilaksanakan. Meski demikian, terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program dimaksud. Kendala/tantangan tersebut yakni:

- Akses sistem informasi keuangan khususnya pada tahapan perencanaan dan penganggaran yang menggunakan sistem dari pusat masih mengalami kelambatan pada jam-jam kerja sehingga proses entri harus dilaksanakan diluar jam kerja; hal ini perlu mendapat perhatian agar proses dapat berjalan sesuai rencana.
- Waktu pengumpulan laporan sangat pendek dikhawatirkan berpengaruh pada data yang disajikan. Perangkat daerah yang mengelola pendapatan dengan jenis pendapatan yang banyak tetap menunggu hingga kalender tahun pelaporan selesai. Setelah itu masih dibutuhkan waktu rekonsiliasi atas penerimaan pendapatan untuk pengakuan pendapatan dan atau piutang sehingga perlu manajemen waktu dengan baik.

Sedangkan kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat

waktu. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.284.275,00 terealisasi sebesar Rp50.126.200,00 atau sebesar 92,34%.

Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dihitung jumlah dokumen yang disusun tepat waktu pada tahun 2023. Dokumen yang harus disusun terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi. Dokumen perencanaan terdiri dari dokumen perubahan rencana kerja tahun 2023 dan dokumen rencana kerja tahun 2024. Dokumen penganggaran terdiri dari dokumen perubahan rencana kegiatan (RKA Perubahan) anggaran tahun 2023, dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahun (RKA) tahun 2023, dokumen perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA Perubahan) tahun 2022 dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024. Dokumen evaluasi terdiri dari laporan bulanan tahun 2023, laporan tahunan tahun 2023 dan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun 2023.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Akses sistem informasi keuangan yang digunakan khususnya pada tahapan perencanaan yang sepenuhnya menggunakan sistem dari pusat masih mengalami kelambatan pada jam-jam kerja sehingga proses entri harus dilaksanakan diluar jam kerja, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar akses menjadi lebih lancar.
- Ketika terjadi permasalahan pada sistem, sangat bergantung dengan pusat sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian dokumen.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan semesteran dan laporan

Barang Milik Daerah semesteran. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp38.307.505.951,00 terealisasi sebesar Rp32.987.134.013,50 atau sebesar 86,11% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyerapan kurang maksimal dikarenakan adanya *slack* penganggaran pada kebutuhan belanja insentif. Anggaran dialokasikan sebesar 5% dari target pendapatan yang dikelola BKAD sedangkan realisasi ditentukan batas atas sebagaimana diatur pada peraturan bupati.

c) Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Adapun total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.058.214.600,00 terealisasi sebesar Rp989.322.060,00 atau sebesar 93,48%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian SKP dan PPKP

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%.

Total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp2.135.519.220,00 terealisasi sebesar Rp1.649.145.259,00 atau sebesar 77,22% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terdapat jenis ATK yang harus disediakan oleh BKAD untuk seluruh perangkat daerah yaitu kertas jenis *conqueror* dan *hammer* yang ber kop maupun tidak. Hal ini menyulitkan perkiraan kebutuhan ATK kertas jenis tersebut, sehingga harus dikoordinasikan dengan TAPD agar perangkat daerah dapat melakukan pengadaan sendiri.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja dengan target 90% terealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp8.443.570.000,00 terealisasi sebesar Rp7.417.124.500,00 atau sebesar 87,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan. Kedua sub kegiatan yang mendukung kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Adanya ketidak sepakatan harga karena pemilik tanah menginginkan harga diatas *appraisal*. Dalam kondisi yang demikian, tim pengadaan berpegang pada hasil *appraisal*.
- Adanya kebutuhan barang milik daerah yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya sehingga administrasi disesuaikan karena adanya kondisi tersebut.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah terealisasi sebesar 100% dan target 100%. Penunjang pelaksanaan tugas terdiri dari layanan surat menyurat, layanan penyediaan jasa langganan, layanan keamanan dan kebersihan kantor dan layanan umum lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp44.204.709.500,00 terealisasi sebesar Rp44.052.492.549,00 atau sebesar 99,65% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Jumlah tagihan Rekening Penerangan Jalan Umum menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, hal ini perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan PLN dan Dinas Perhubungan.
- Data terkait sediaan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk bahan pertimbangan perencanaan kebutuhan.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah terpelihara terealisasi sebesar 90% dari target 90% sehingga capaian 100%. Barang milik daerah terdiri dari kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair, gedung kantor dan barang milik daerah lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp1.216.820.450,00 terealisasi sebesar Rp1.070.749.390,50 atau sebesar 87,99% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub

kegiatan yang mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Pemeliharaan kendaraan dilakukan berdasarkan permintaan dari pemegang kendaraan tidak terjadwal.
- Solusi: disusun jadwal pemeliharaan atas kendaraan untuk menambah umur ekonomis.

h) Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan layanan BLUD terealisasi sebesar 98% dari target sebesar 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 960.000.000,00 terealisasi sebesar Rp793.588.887,00 atau sebesar 82,66% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan. Alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran.

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Piutang dana penguatan modal yang relatif tinggi baik dari segi jumlah penerima maupun nilainya, memerlukan upaya intensif untuk melakukan penagihan.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan Keuangan Daerah memiliki 4 (empat) indikator yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang dan sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan. Keempat indikator tersebut adalah:

1. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran daerah oleh bidang anggaran
2. Persentase ketepatan waktu dalam penafusaan keuangan daerah melalui kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah oleh bidang perbendaharaan
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah oleh bidang akuntansi, dan

4. Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan melalui kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh sekretariat.

Masing-masing indikator tersebut tercapai 100%, sehingga program pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 berhasil dilaksanakan. Meski demikian terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program dimaksud. Kendala/tantangan tersebut yakni:

- Teknologi informasi sangat membantu meningkatkan validitas data dan ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan. Namun demikian dengan banyaknya fitur-fitur pada aplikasi perlu upaya agar implementasi optimalisasi teknologi dapat berjalan dengan berpayung pada regulasi dan mudah diterapkan oleh pengguna akhir (*end user*).
- Ketidaktepatan realisasi aliran kas dengan rencana terutama aliran kas masuk menyebabkan kekhawatiran kekosongan kas sehingga perlu upaya untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
- Proses penyusunan dokumen anggaran melalui tahapan persetujuan DPRD sehingga perlu upaya untuk sinkronisasi terkait agenda DPRD agar dokumen anggaran tepat waktu.
- Koordinasi terkait penyaluran dana-dana ke desa perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pembangunan dan pergerakan perekonomian desa.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar Rp497.697.964.148,00 terealisasi sebesar Rp482.585.203.497,00 atau sebesar 96,96%. Adapun kegiatan yang mendukung program pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dibawah:

a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini indikator kinerjanya adalah persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen anggaran terdiri dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Raperda APBD dan Raperda PAPBD.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerahan dokumen KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 bulan Juli. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2023.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan penetapan rancangan perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Rancangan Perda APBD Pemerintah Kabupaten Siemang tahun anggaran 2024 dan rancangan perbup tentang penjabaran APBD ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp2.450.911.100,00 terealisasi sebesar Rp2.163.487.660,00 atau sebesar 88,27% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung 5 (lima) sub kegiatan dengan masing-masing alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi sebagaimana difampirkan pada lampiran 2.

Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Sistem yang digunakan untuk penyusunan dokumen anggaran menggunakan sistem dari pusat yang aksesnya masih belum lancar pada jam kerja sehingga proses entri yang dilaksanakan perangkat daerah banyak dilakukan diluar jam kerja
- Proses penyusunan dokumen anggaran melalui tahapan persetujuan DPRD sehingga perlu upaya untuk sinkronisasi terkait agenda DPRD agar dokumen anggaran tepat waktu
- Informasi terkait adanya dana tambahan terlambat dan jumlahnya sulit diprediksi oleh pemerintah daerah sehingga perlu upaya lebih untuk redesign penganggaran melalui proses revisi anggaran

b) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Salah satu fungsi BKAD adalah sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) yang tugas utamanya adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan

kinerja diukur dengan ketepatan waktu pencairan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah termasuk pula mengatur ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D tahun 2023 yang tepat waktu dan mencukupi kebutuhan belanja APBD 2023 dengan total pencairan SP2D Rp2.948.899.948.392,31. Dalam penatausahaan keuangan daerah BKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga administrasi penatausahaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih valid. Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan daerah yang secara *online* terhubung dengan Bank Kasda. BKAD selaku BUD telah memanfaatkan landa tangan elektronik tersebut untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) *online* sehingga SP2D terbit tepat waktu sesuai dengan peraturan yaitu maksimal 2 hari.

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penatausahaan keuangan meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pengelolaan dana daerah. Sedangkan total anggaran tuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp697.097.724,00 terealisasi sebesar Rp633.543.119,00 atau sebesar 90,86% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah didukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan. Ketujuh sub kegiatan yang mendukung kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait



Gambar 3.9 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat

c) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD terealisasi sebesar 100 persen dari target 100%. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Perhitungan indikator pada tahun 2023 adalah untuk mengukur penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 ditetapkan tanggal 24 Mei 2023.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp643.496.250,00 terealisasi sebesar Rp639.919.556,00 atau sebesar 99,44% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan ini didukung dengan 4 (empat) sub kegiatan. Keempat sub kegiatan yang mendukung kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten
- Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah

- Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota



Gambar 3.10 Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Adanya kebijakan percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dikhawatirkan berdampak pada kualitas penyusunan LKPD
- Adanya kebijakan percepatan penyusunan LKPD berdampak pada pengambilan kebijakan cut off transaksi pada akhir tahun sehingga perlu pemahaman bendahara pengeluaran untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan terbayar.
- Tingkat pemahaman petugas pembuku terhadap Standar Akuntansi Pemerintah belum merata

d) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dari total anggaran yang dikelola BKAD sebanyak 72,28% teralokasi untuk kegiatan ini. Jenis belanja yang dikelola pada kegiatan ini sebagian besar adalah belanja tidak terduga dan belanja transfer kepada pemerintah Desa. Hal ini mengingat fungsi BKAD selaku Bendahara Umum Daerah yang menjadi lalu lintas uang masuk dan keluar. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp493.906.057.074,00 terealisasi sebesar Rp479.146.252,00 atau sebesar 97,00%. Kegiatan Didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
- Pengelolaan dana darurat dan mendesak

- Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kegiatan ini merupakan fasilitasi pendanaan untuk desa atau perangkat daerah terkait yang pencairannya sangat bergantung dari pengajuan dari desa atau perangkat daerah sehingga koordinasi untuk mendorong percepatan pembangunan atau penanganan bencana untuk dana darurat sangat diperlukan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah hanya didukung 1 (satu) kegiatan dengan nama yang sama yaitu pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A. Indikator ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah.

Target indikator persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A adalah sebesar 86% terealisasi sebesar 86% sehingga capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari jumlah perangkat daerah yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman dikali 100%. Kategori tertib administrasi pengelolaan BMD adalah penyampaian dokumen administrasi pengelolaan BMD tepat waktu. Dokumen tersebut adalah berita acara rekonsiliasi bulanan, laporan semester 1 tahun n, laporan semester 2 tahun 2-1, RKBMD awal, RKBMD perubahan.

Dengan demikian program pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2023 berhasil dilaksanakan. Meski demikian, terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program pengelolaan barang milik daerah. Kendala/tantangan tersebut yakni:

- Masih banyak asset yang secara administrasi belum tertib baik menyangkut status kepemilikan maupun penatausahaannya sehingga masih perlu upaya lebih untuk mengurangi permasalahan.
- Perlu adanya peninjauan ulang terkait pengaturan pengadaan barang milik daerah khususnya pada tahapan perencanaan, karena waktu yang berhimpitan dengan penyusunan renja sehingga penelitian terkait usulan pengadaan dari perangkat daerah kurang optimal.
- Tingkat pemahaman pengurus barang belum merata sehingga pendampingan dan pembinaan harus terus dilakukan.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp7.451.135.230,00 terealisasi sebesar Rp6.864.996.816,00 atau sebesar 92,13% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan pengelolaan barang milik daerah didukung dengan 5 (lima) sub kegiatan. Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 3.11 *Workshop Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah hanya didukung satu kegiatan dengan nama kegiatan yang sama dengan nama program. Total anggaran untuk melaksanakan program pengelolaan pendapatan daerah adalah sebesar Rp15.819.107.675,00 dan terealisasi sebesar Rp14.818.806.704,00 atau sebesar 93,67%. Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta bidang penagihan dan pengembangan PAD.

Terdapat 2 (dua) indikator untuk indikator kinerja masing-masing bidang. Kedua indikator tersebut adalah Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dan persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah terealisasi sebesar 84,54 dari target 78,90 sehingga capaian sebesar 107,15%. Indeks diperoleh dari hasil survei kepada pengguna jasa pelayanan pajak daerah dengan responden dipilih secara acak random sampling.

Sedangkan indikator persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah terealisasi sebesar 22,28% dari target 9,49% sehingga capaian sebesar 234,77%. Indikator dihitung dari kenaikan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang pada dokumen APBD murni tahun 2023 dibandingkan dengan target pada APBD murni 2022. Adapun capaian sangat signifikan dapat dijelaskan bahwa kondisi perekonomian jauh lebih baik dibanding prediksi pada saat penentuan target yaitu pada saat penyusunan renstra pada tahun 2020. Pada tahun tersebut pandemi covid masih berada pada level yang sangat tinggi, pergerakan ekonomi dan sosial dibatasi, sehingga berpengaruh pada penentuan target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dengan tercapainya kedua indikator pada program pengelolaan pendapatan daerah sehingga program tersebut pada tahun 2023 berhasil dilaksanakan. Meski demikian, terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program pengelolaan barang milik daerah. Kendala/tantangan tersebut yakni Kendala/tantangan tersebut yakni:

- Pemutakhiran teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan penerimaan PAD masih juga berhadapan dengan respon negatif wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya laporan nihil dari wajib pajak walaupun secara operasional berdasarkan pemantauan petugas wajib pajak masih beroperasi dan memungut pajak dari pembelinya.
- Kesadaran wajib pajak masih perlu didorong sehingga edukasi masih harus terus dilakukan.
- Terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berimplikasi pada tata kelola penatausahaan penerimaan dan upaya pencapaian penerimaan. Secara tata kelola penatausahaan perlu upaya besar atas penyesuaian peraturan baru sehingga penguatan data base sangat diperlukan. Undang-undang tersebut mengatur Pemerintah Daerah melakukan rasionalisasi retribusi daerah, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi pajak pusat dengan pajak daerah berupa konsumsi, properti dan sumber daya alam. Selain itu Terdapat item pajak yang tidak diatur lagi sehingga harus dihapus yaitu pajak kos-kosan dan juga terdapat pajak yang tarifnya turun yaitu pajak hiburan yang sebelumnya diatur dengan tarif 45% pada ketentuan baru tarif menjadi 40%.

Adapun kesepuluh sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- Penagihan pajak daerah
- Penyelesaian keberatan pajak daerah
- Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah



Gambar 3.12 Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang No 1 Tahun 2022



Gambar 3.13 Kegiatan Pemantauan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2023

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program penunjang urusan kebutuhan administrasi perkantoran				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100	100
2.	Program pengelolaan keuangan daerah				
	a. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	100
	b. Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100	100	100
	c. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD	%	100	100	100
3.	Program pengelolaan barang milik daerah				
	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) kategori A	%	84	84	100
4.	Program pengelolaan pendapatan daerah				
	a. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	2,98	26,10	876,86
	b. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	Indeks	78,80	81,94	103,98

3.5. Hasil Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BKAD, susunan organisasi BKAD memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT). UPT tersebut adalah UPT Stadion Maguwoharjo dan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal. Sesuai dengan namanya UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal memiliki tugas dan fungsi mengelola dana penguatan modal Pemerintah Kabupaten Sleman. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada pelaku usaha perorangan, kelompok atau badan usaha yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari bank. Dana penguatan modal ini diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga pengembalian atas pinjaman dana penguatan modal ini dapat digulirkan kembali untuk kemanfaatan yang lebih luas.

Peraturan Bupati Nomor 54.2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal mengatur bahwa sasaran penerima dana penguatan modal adalah sebagai berikut:

1. Calon tenaga kerja Indonesia;
2. Kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM), asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian;
3. Koperasi;
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:
 - a. pelaku usaha perdagangan;
 - b. pelaku usaha perindustrian;
 - c. pelaku usaha pariwisata;
 - d. pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada point 2
 - e. korban pemutusan hubungan kerja;
 - f. lulusan pelatihan/kursus;
 - g. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - h. kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) termasuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kelompok PKK dan kelompok kegiatan perlindungan anak;
 - i. kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL);
 - j. Badan Usaha Milik Kelurahan;
5. Unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
6. Lembaga keuangan non bank, antara lain:
 - a. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP);

b. Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam (UEP SP);

c. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya.

Operasional dalam pengelolaan dana penguatan modal ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Alokasi anggaran untuk operasional melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp969.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 791.984.787,00 atau sebesar 82,5%.

Sedangkan alokasi plafon dana penguatan modal ditentukan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siemang yang menangani pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal. Setiap awal tahun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan koordinasi dengan instansi teknis terkait, UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal Kabupaten Siemang menentukan plafon dana penguatan modal untuk masing-masing jenis bidang dana penguatan modal. Sumber pembiayaan dana penguatan modal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dari pengembalian angsuran pokok dana penguatan modal.

Tahun 2023 target penyaluran dana penguatan modal untuk tahun 2023 sebesar Rp22.916.000.000, terealisasi sebesar 28.454.800.000,00 atau 124% dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian realisasi penyaluran dana penguatan modal untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Penyaluran Dana Penguatan Modal Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih (Kurang) (Rp)
I.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan				
1.	Tanam Pangan	1.500.000.000,00	2.805.000.000,00	174%	1.305.000.000,00
2.	Peternakan	4.500.000.000,00	5.261.000.000,00	117%	761.000.000,00
3.	Perikanan	2.200.000.000,00	2.684.000.000,00	122%	484.000.000,00
4.	Hortikultura dan Perkebunan	1.800.000.000,00	2.510.000.000,00	139%	710.000.000,00
5.	Ketahanan Pangan	1.000.000.000,00	1.935.000.000,00	194%	935.000.000,00
II.	Dinas Perindag				
1.	Permitustrian	500.000.000,00	420.000.000,00	84%	-80.000.000,00
2.	Perdagangan Tradisional	755.000.000,00	935.000.000,00	123%	170.000.000,00
III.	Dinas Koperasi dan UKM				
1.	Koperasi	4.275.000.000,00	5.125.000.000,00	117%	750.000.000,00
2.	UKM	600.000.000,00	784.800.000,00	131%	184.800.000,00
IV.	Dinas Tenaga Kerja				
1.	Tenaga Kerja (CTK)	180.000.000,00	110.000.000,00	61%	-60.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Lebih (Kurang) (Rp.)
2.	Tenaga Kerja (Ter-PMK)	0,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00
3.	Tenaga Kerja (Lulusan Pelatihan)	80.000.000,00	80.000.000,00	87%	-30.000.000,00
V.	Dinas Sosial				
1.	Kes. Sosial (PMKS/USEP)	230.000.000,00	230.000.000,00	100%	0,00
VI.	Badan KB, PM & PP				
1.	Kali UPPKS	1.500.000.000,00	1.894.000.000,00	118%	394.000.000,00
VII.	Dinas Pemberdayaan Desa				
1.	Kali UP2K, PKK & KPA	98.000.000,00	98.000.000,00	100%	0,00
2.	BLMDes	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83%	-200.000.000,00
3.	UPK	0,00	0,00	-	0,00
VIII.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata				
1.	Pariwisata	0,00	0,00	-	0,00
IX.	Bagian Perekonomian				
1.	BUKP	2.380.000.000,00	2.750.000.000,00	116%	450.000.000,00
	Jumlah	22.918.000.000,00	26.454.800.000,00	114%	3.538.800.000,00

Pengelolaan dana penguatan modal selama ini telah berjalan dengan lancar, namun demikian tunggakan dana penguatan modal masih relative tinggi. Hal ini disebabkan antara lain:

- Kegiatan usaha yang dilaksanakan para peminjam dana penguatan modal mengalami kegagalan.
- Dana pinjaman penguatan modal dipergunakan untuk keperluan lain di luar kegiatan usaha.

Untuk mengatasi tunggakan dana penguatan modal, maka dilakukan beberapa upaya, yaitu:

- Mengintensifkan kegiatan penagihan, baik yang dilakukan oleh UPT PDPM maupun bersama-sama dengan Dinas teknis terkait.
- Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Kejaksaan Negeri Sleman untuk melakukan penagihan.

Selama tiga tahun berturut-turut jumlah dana penguatan modal dan jumlah penerima dana penguatan modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pengelolaan Dana Penguatan Modal

No	Keterangan	2021	2022	2023
1.	Dana Tersalur	28.15 M	27.93 M	28.45 M
2.	Jumlah kelompok Penerima	317	326	326

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023

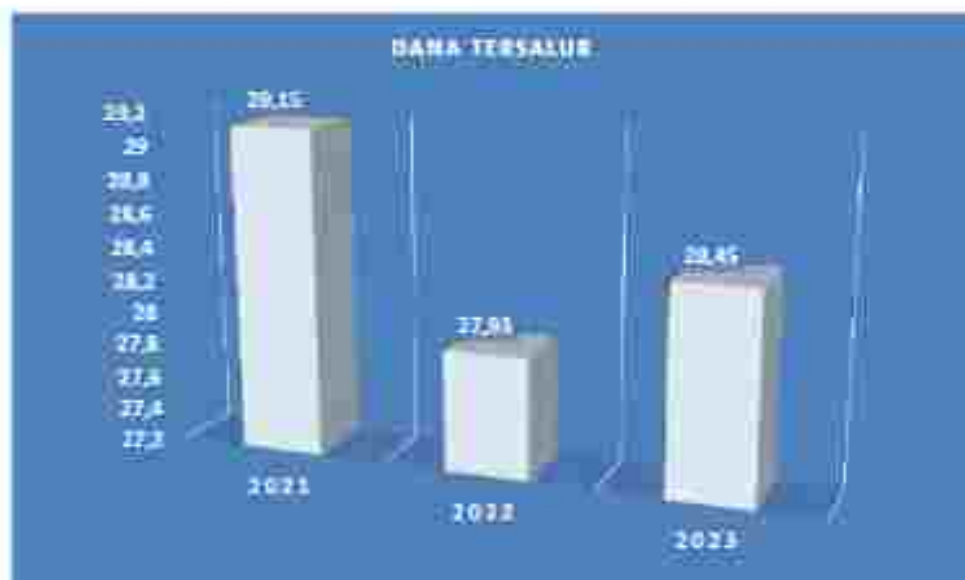
Berdasarkan uraian dalam Bab I hingga Bab III, secara umum capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Grafik Capaian Kinerja BKAD Tahun 2021 s.d 2023

Atas keberhasilan capaian kinerja tersebut upaya untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib terus dilakukan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan yang terus berubah dari tahun ke tahun serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik.

Pada LKjIP tahun 2023 ini telah memuat tindak lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2023 sebagai penyempurnaan laporan kinerja meliputi definisi operasional, formulasi penghitungan dan sumber data dalam Bab III serta factor penghambat dan/atau pendukung, analisis detail keberhasilan program/kegiatan, dan analisis efisiensi anggaran program/kegiatan. Terkait penyaluran dana penguatan modal berikut grafik capaian penyaluran dan jumlah kelompok penerima dana penguatan modal.



Gambar 4.2 Grafik Dana Penguatan Modal yang tersalur



Gambar 4.3 Grafik Jumlah Kelompok Penerima

Pencapaian kinerja tahun 2023 didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan indikator sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Bupati Nomor 38.8/Kep.KDH/A/2023 tentang Rencana Aksi Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. BKAD melaksanakan aksi reformasi birokrasi general sebagai berikut

a. Sasaran Strategis 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyederhanaan birokrasi

Struktur organisasi di BKAD terdiri dari 1 sekretariat, 6 bidang dan 2 UPT dengan pejabat struktural sebanyak 14 pejabat yang terdiri dari 1 pejabat eselon II, 1

pejabat eselon IIIa, 6 pejabat eselon IIIb, 4 pejabat eselon IVa dan 2 pejabat eselon IVb.

- Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi. Indikatornya adalah predikat SAKIP, tercapai dengan nilai SAKIP A dengan nilai 84. Pelaksanaan SAKIP didukung dengan adanya aplikasi eSAKIP. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam pelaksanaan SAKIP pada tahun 2023 admin BKAD juga telah mengikuti Bimtek eSAKIP yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi. Monitoring dan reviu pelaksanaan SAKIP dilakukan oleh tim SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten.

- Pelaksanaan arsip digital

Pengelolaan arsip digital di Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menggunakan aplikasi SIMARDA Versi 2. Seluruh pegawai struktural dan sub koordinator telah memiliki akun pada aplikasi SIMARDA. Namun dalam pengaplikasiannya belum semua memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan kesulitan membuka SIMARDA sehingga masih dibantu dengan cetak surat. Sedangkan untuk surat keluar surat keluar aplikasi Srikandi belum sepenuhnya digunakan, karena volume surat keluar yang sangat tinggi sedangkan jaringan sistem sangat lambat.

- Penguatan Pengelolaan Keuangan

Dilaksanakan melalui beberapa aksi sebagai berikut:

- a) Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran

Indikator rencana aksi ini adalah terwujudnya dokumen pakta integritas. Dokumen pakta integritas ini ditandatangani secara bersama oleh legislative dan eksekutif dalam rangka pengesahan RAPBD. Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Sieman Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sieman yang dihadiri oleh jajaran legislatif dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sieman. Penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. Momen penandatanganan pakta integritas diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta meningkatkan profesionalisme dan integritas lembaga penyelenggaraan pemerintah daerah.

- b) Menyusun Dokumen Anggaran Daerah Tepat Waktu

Indikator dari rencana aksi ini adalah adalah persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen anggaran terdiri dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementas), KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Raperda APBD dan Raperda PAPBD.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerahan dokumen draf KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 bulan Juli. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Dokumen draf KUA PPAS Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman diserahkan kepada DPRD pada tanggal 12 Juli 2023. Sedangkan kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2023.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan penetapan rancangan perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

c) Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu

Indikator output dan rencana aksi ini adalah dokumen pertanggungjawaban APBD tersusun tepat waktu. Terealisasi sebesar 100 persen dari target 100%. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 ditetapkan tanggal 24 Mei 2023.

d) Menyelenggarakan pembinaan bagi pengurus barang milik daerah untuk menjaga tertib administrasi pengelolaan BMD

Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk

pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Indikator rencana aksi ini adalah jumlah pembinaan pengurus barang. Target dari indikator sebanyak 12 kali terealisasi sebanyak 12 kali. Guna meningkatkan tertib administrasi penatatausahaan barang milik daerah, BKAD selaku koordinator pengelolaan barang milik daerah terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan SDM, khususnya pengelola barang pada tiap perangkat daerah. Pembinaan kepada pengurus barang dilakukan setiap bulan sekaligus dilakukan rekonsiliasi barang milik daerah dan sediaan. Pembinaan dilakukan setiap bulan dengan maksud agar permasalahan terkait penatatausahaan barang milik daerah terdeteksi sedini mungkin sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan ditemukan solusi. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan secara Bersama dengan pembuku sehingga nilai asset yang tersaji pada laporan keuangan valid.

Hasil rekonsiliasi tiap bulan tertuang dalam berita acara hasil rekonsiliasi aset dan sediaan. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Berita Acara hasil rekonsiliasi aset dan sediaan dipergunakan bendahara pengeluaran perangkat daerah sebagai syarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan.

e) Melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah

Indikator *output* atas rencana aksi ini adalah Persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah. Capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 36,65%. Sedangkan target PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2023 adalah sebesar 31%. Perhitungan berdasarkan pada LRA tahun 2023 *unaudited*. Realisasi PAD sampai tahun 2023 sebesar Rp1.130.157.860.240,59. Sedangkan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp3.083.612.992.324,47.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Penggalan potensi pajak daerah dengan melakukan analisis serta penyusunan kajian dalam rangka pengembangan pajak daerah.

Penggalan potensi ini dilakukan melalui kegiatan antara lain pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak. Beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan setiap tahunnya, walaupun setiap tahunnya juga ada sebagian wajib pajak tutup. Upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (*intensive*) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi nil dan wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Sleman. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembandingan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun

berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak yang kurang atau tidak taat peraturan dilakukan pembinaan khusus hingga dapat dilakukan pemeriksaan.

2. Sosialisasi dalam Rangka Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD selalu berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui penyebaran informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Disamping itu juga merasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat semakin sadar membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional.

3. Perbaikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKAD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. BKAD terus berupaya melakukan inovasi pada setiap tahunnya untuk memudahkan masyarakat membayar dan melaporkan pajak. Berbagai fasilitas sarana dan prasarana terkait pelayanan juga terus ditingkatkan. Kepuasan terhadap pelayanan wajib pajak diukur melalui survey kepuasan atas pelayanan pajak setiap semester. Melalui link lapor sleman, email, IG, masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan atas pelayanan pajak untuk segera ditindaklanjuti.

4. Penegakan Peraturan Perpajakan

Penegakan aturan ini salah satunya ditempuh berupa pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan upaya penegakan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem sesuai ketentuan yang berlaku. Pada setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada beberapa wajib pajak terpilih dengan berdasarkan *track record* wajib pajak. Mengingat jumlah wajib pajak daerah yang banyak tidak memungkinkan keseluruhan pemeriksaan dilakukan oleh KAP. Penegakan peraturan obyek pajak selain yang menjadi obyek pemeriksaan KAP dilakukan oleh petugas BKAD melalui pemantauan dan pemanggilan untuk dilakukan pembinaan.

5. Membangun Kerjasama yang harmonis dengan beberapa pihak

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD telah membangun beberapa Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKAD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Kerjasama juga terjalin dengan pemerintah desa dan kecamatan serta perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sleman untuk optimalisasi penerimaan PBB P2. Terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak BPHTB Kerjasama juga dilakukan dengan instansi vertikal yaitu dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta dengan Kantor Pertanahan. Kerjasama dengan kedua instansi tersebut utamanya adalah kerjasama aliansi dalam rangka perbaikan pelayanan dan memberikan kepastian nilai Dasar Pengenaan Pajak yang sama kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak BPHTB dan PPh pasal 4 ayat 2 untuk pajak pusat. Dengan upaya kerjasama aliansi tersebut diharapkan mendorong penerimaan pajak daerah dan pajak pusat sekaligus.

Sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menjalin hubungan baik dengan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai lembaga yang menaungi seluruh hotel dan restoran. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah kabupaten Sleman dan pengelola/pemilik Hotel dan Restoran khususnya yang berada di wilayah Sleman. Dengan PPAT/Notaris Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD telah terjalin hubungan Kerjasama yang baik terkait dengan optimalisasi Pajak BPHTB.

b. Sasaran Strategis 2: Budaya birokrasi BerAkhlak dengan ASN yang Profesional

Penataan Jabatan Fungsional

BKAD memiliki 1 JF Perencana, 1 JF Penilai Pemerintah, 15 JF Analis Keuangan Pusat Daerah, dan 2 JF Arsiparis. Selain itu di tahun 2024 BKAD juga mendapatkan JF Arsiparis Terampil baru hasil dari seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4.2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Berdasarkan Surat Nomor 700/04/F34/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, direkomendasikan agar BKAD mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

Tabel 4.1 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Mempertahankan kinerja yang telah dicapai	Meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Daerah	B	April s.d Desember	Sekretaris	Tahun 2023 selesai dengan capaian nilai IPKD A Tahun 2024: Bulan April akan dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah pendukung IPKD Bulan Juni mengirim personil untuk mengikuti Bimtek pengelolaan IPKD Bulan September dengan mengikuti petunjuk kementerian melalui Pemprov melakukan entri pada sistem IPKD
2.		Meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	Januari s.d Desember	Sekretaris	Tahun 2023 selesai, IKM 2023 adalah 84,84 Tahun 2024: Penambahan sarana dan prasarana diantaranya adalah penambahan toilet dan kantin (penawaran) Lanjutan penataan ruang pelayanan, saat ini sampai proses penawaran
3.		Meningkatkan nilai AKIP	A	Juli	Sekretaris	Selesai, penilaian AKIP mendapatkan nilai A Tahun 2024: Meningkatkan ketepatan waktu pengimanan laporan keuangan, laporan kepegawaian, laporan pelaksanaan tugas dan LKIP

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Daftar Prestasi, beserta dokumentasi piagam/sertifikat, dan dokumentasi seremonialnya.

Lampiran 1:

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 1:

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

Tanggal 02 Januari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haris Sitarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kustini Sri Purnomo
Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA

HARIS SITARTA SE, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 196408311993031006

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala BKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	B	B	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
2.		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	B	B	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	-	-	-	81,50	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
4.		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	-	-	A	A	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB

Program

Anggaran

Keterangan

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 468.353.166.091,00 |
| 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 7.460.644.730,00 |
| 3. Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. 14.660.215.175,00 |
| 4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 92.233.112.136,00 |
| 5. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan | Rp. 83.312.000,00 |


 Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

Sleman, 2 Januari 2023
 Kepala BKAD Kabupaten Sleman

HARI SUTARTA SE, MT
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 196408311992031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abu Bakar, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19840831 199303 1 006

Sieman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Abu Bakar, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19710710 199101 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Sekretaris BKAD

no	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100
		PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Prosentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran. Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja.	25%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.

2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
---	-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	------	--

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 134.940.275,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 44.500.380.951,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.377.741.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.560.434.500,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.839.595.000,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.325.620.450,-
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 463.327.205.717,-

Kepala BKAD Kab Siemari

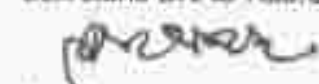

Hans Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19640831 199303 1 006

Siemari, 2 Januari 2023

Sekretaris BKAD Kab. Siemari


Abu Bakar, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I, IVb

NIP.19710710 199101 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Abu Bakar, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sieman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Abu Bakar, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710710 199101 1 002

Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 1973110 4200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

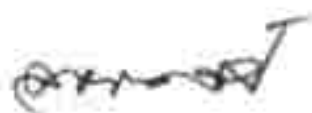
No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja Tahun n+1	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Dokumen Renja Perubahan Tahun n	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun n	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		4. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Dokumen RKA-SKPD Tahun n+1	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun n	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Dokumen DPA-SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun n	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Laporan Tahunan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2. Dokumen LKJLP/LAKIP	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

		3. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja (per Triwulan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		4. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		5. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja (per Triwulan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		6. Dokumen Laporan RFK (Form Sesuai Bagian Pembangunan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		7. Dokumen Laporan Bulanan (Form Sesuai Bagian Pemerintahan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.120.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.812.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.091.600	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.349.900	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.124.900	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.441.375	

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman



Abu Bakar, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat, I/IVb
NIP. 19710710 199101 1 002

Sleman, 2 Januari 2023

Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok
Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat



Tin Ibriz Faria, SE, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 19731104 200501 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Abu Bakar, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Abu Bakar, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I/IVb
NIP 197107101991011002

Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 197205291998032007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Subbagian Umum dan Kepegawaian

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Informasi Birokrasi	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Laporan Administrasi Kepegawaian	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. Pembayaran Tenaga non PNS/PHL	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Alat Listrik	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Layanan keamanan Kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Layanan kebersihan kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50

				Triwulan II	75	75
				Triwulan IV	100	100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. ATK	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Layanan Makanan dan Minuman Rapat	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Layanan Makanan dan Minuman Tamu	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Layanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan penyedia sarana dan prasarana	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

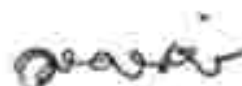
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan pemeliharaan Gedung dan taman	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Layanan Surat Menyurat	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran Jasa Langganan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Layanan Kebersihan Kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Layanan Penyediaan BBM Kendaraan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75

				Triwulan IV	100	100
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan kerja	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Rp. 1.377.741.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 208.269.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.543.199.500,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 805.956.500,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 298.321.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 155.400.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 828.429.000,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 2.067.600.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.466.900.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 163.000.000,00,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 35.884.060.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 513.374.500,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 710.000.000,00	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 231.050.000,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 384.470.450,00	

Sekretaris BKAD



Abu Bakar, S.Sos, M.Si
 Penata Tingkat I, IV/b
 NIP. 19710710 199101 1 002

Ka.Subbagian Umum dan Kepegawaian



Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19720529 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Misri Rusmiyati, SE, M.M

Jabatan : Kepala Subbidang Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Abu Bakar, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Abu Bakar, S.Sos, M.Si

Penata Tingkat I/IVb

NIP. 19710710 199101 1 002

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Misri Rusmiyati, SE, M.M

Penata Tingkat I III/d

NIP. 19720113 199208 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Keuangan Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		4. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan ASN	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		5. Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
		2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
		3. Tunjangan Pengelola BMD	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Dokumen Laporan Aset/BMD	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		2. Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	20	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	20	20
		3. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

		4. Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		5. Koordinasi Pengelola Keuangan BKAD	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.43.719.142.751,00	
2. Pelaksanaan Penata usahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 641.900.000,00	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 139.338.200,00	

Sekretaris BKAD Kabupaten Sleman



Abu Bakar ,S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP.19710710 199101 1 002

Kepala Subbagian Keuangan

Sekretariat BKAD Kab.Sleman



Misri Rusmiyati,SE.M.M
Penata Tingkat I.III/d
NIP. 19720113 199208 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IVa
NIP 19640831 199303 1 008

PIHAK PERTAMA

Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP 19690327 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan Pajak Daerah.	-	-	-	70,67 %	Indeks kepuasan layanan Pajak yang diperoleh dari hasil survei terhadap Wajib Pajak Daerah.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.118.210.175,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman


Harts Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan


Rodentus Endrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Liliana Sukawati, ST, M.IDS, M.Ec.Dev.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

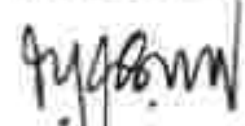
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA


Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP.19690327 199803 1 002

PIHAK PERTAMA


Liliana Sukawati, ST, M.IDS, M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19840517 200903 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1. Verifikasi SPTD Pembinaan Per Wajib Pajak Secara Langsung	30	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	25	25
				Triwulan III	25	25
				Triwulan IV	25	25
2.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1. Dokumen Pemeriksaan WP	30	Triwulan I	15	15
				Triwulan II	30	30
				Triwulan III	35	35
				Triwulan IV	20	20

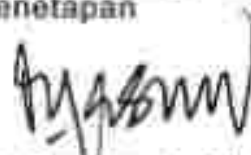
No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 549.425.000,00
2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 2.268.801.375,00

Kepala Bidang



Rodentus Condrosulistyo, SE. MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327.199803.1.002

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku
Sub-Koordinator Kelompok Substansi
Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan



Liliana Sukawati, ST, M.IDS. M. Ec. Dev.
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19840517 200903 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ivhal Ilyas, S.Sos.,M.A.,M.Ec.Dev
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA


Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327 199803 1 002

PIHAK PERTAMA


Ivhal Ilyas, S.Sos.,M.A.,M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19820531 201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Keompok Substansi Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1. Administrasi PBB	100	Triwulan I	15	15
				Triwulan II	31	31
				Triwulan III	28	23
				Triwulan IV	26	26
		2. Analisis Data PBB P2	100	Triwulan I	15	15
				Triwulan II	31	31
				Triwulan III	28	23
				Triwulan IV	26	26
		3. Cetak SPPT PBB P2	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		4. Pemantauan dan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB P2	100	Triwulan I	100	100
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-

		5. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		6. Pemutakhiran Data PBB	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		7. Penyampaian SPPT PBB yang Diterbitkan Massa	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		8. Penyusunan SK Bupati Tentang NJOP PBB P2 2023	100	Triwulan I	100	100
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		9. SK NJOP	100	Triwulan I	100	100
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		10. Verifikasi SPPT PBB P2	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2

2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1. Laporan Data Wajib Pajak	100	Triwulan I	25,8	25,8
				Triwulan II	25,4	25,4
				Triwulan III	26,2	26,2
				Triwulan IV	22,6	22,6
		2. Pelayanan Wajib Pajak	100	Triwulan I	25,3	25,3
				Triwulan II	27,6	27,6
				Triwulan III	30,3	30,3
				Triwulan IV	16,8	16,8
		3. Wajib Pajak Baru	100	Triwulan I	28,4	28,4
				Triwulan II	30,4	30,4
				Triwulan III	31,8	31,8
				Triwulan IV	13,8	13,8

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 709.162.000,00	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 845.356.800,00	

Kepala Bidang



Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327 199803 1 002

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok
Substansi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan



Ivha Ilyas, S.Sos., M.A., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19820531 201001 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

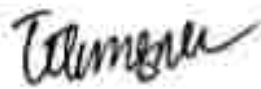
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina.IV/a
NIP.19690327 199803 1 002


Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
Pembina.IV/a
NIP.197206151992032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Penetapan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

NO	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1. Penilaian PBB	10	Triwulan I	2	2
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	6	6
				Triwulan IV	10	10
		2. Laporan Hasil Penelitian Kantor dan Lapangan	10	Triwulan I	1	1
				Triwulan II	2	2
				Triwulan III	4	4
				Triwulan IV	5	5
		3. Tercapainya Target Penerimaan BPHTB	40	Triwulan I	10	10
				Triwulan II	20	20
				Triwulan III	30	30
				Triwulan IV	40	40
		4. Validasi SSPD BPHTB	40	Triwulan I	10	10
				Triwulan II	20	20
				Triwulan III	30	30
				Triwulan IV	40	40

2.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Surat Ketetapan Pajak Daerah	50	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. SPPT PBB P2	50	Triwulan I	97	97
				Triwulan II	1	1
				Triwulan III	1	1
				Triwulan IV	1	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 380.200.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 365.265.000	

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan


 Rodenas Condrosulistyo, SE, MM
 Pembina, IV/a
 NIP 196903271998031002

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan


 Tirtin Fathonah, S.Sos, M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP 197206151992032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kusniti, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640831 190303 1 006

PIHAK PERTAMA

Kusniti, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP 19660207 199302 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	31 %	31 %	31 %	31 %	Jumlah realisasi PAD tahun n dibagi jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n dikali 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 9.542.000.000,00	

Sleman, 2 Januari 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman


 Haris Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan


 Kusniati, SE, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19660207 199302 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak

Jabatan : Kepala TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19840831 199303 1 008

PIHAK PERTAMA

Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19700607 19970 3 1006

**PERUBAHAN KESKUA ATAS PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Badan Kerja Pemangkas Dikawatir: BKAD
 UPTD: Pengawasan Dana Pengeluaran Modal
 Tahun Anggaran: 2022

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahunan I	Tahunan II	Tahunan III	Tahunan IV	Status Perkembangan
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan persentase kebutuhan akan tenaga kesehatan	25%	50%	75%	100%	Untuk layanan administrasi pemerintahan yg beroperasi di bag. lanjut layanan yg telah banyak beroperasi di bag. 100.

No	Program	Kegiatan	Program		Revisi
			KR. 2022/2023	GR. 2022/2023	
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
		Jumlah	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	

Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah


 Hana Gusriah, ST, MT
 Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah
 NIP. 19640221 199302 1 006

Kepala UPTD Pengawasan Dana Pengeluaran Modal


 Afriadi Sudharma, ST, Ak
 Kepala UPTD Pengawasan Dana Pengeluaran Modal
 NIP. 19700627 199202 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Safira Harya Rekyani, SE, M.Acc
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penagihan Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kurniati, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Kurniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 196602071993022001

PIHAK PERTAMA

Safira Harya Rekyani, SE, M.Acc
Pembina IV/a
NIP. 197206211997032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Penagihan

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penagihan Pajak Daerah	1. Bahan Perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10
		2. Intensifikasi Penagihan PBB P2 di 86 Desa	10	Triwulan I	3	3
				Triwulan II	6	6
				Triwulan III	9	9
				Triwulan IV	10	10
		3. Laporan Perkembangan Piutang Pajak Daerah	10	Triwulan I	2.5	2.5
				Triwulan II	5	5
				Triwulan III	7.5	7.5
				Triwulan IV	10	10
		4. Laporan Realisasi Pajak Daerah	10	Triwulan I	2.5	2.5
				Triwulan II	5	5
				Triwulan III	7.5	7.5
				Triwulan IV	10	10
		5. Pemanggilan WP Daerah	10	Triwulan I	4	4
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	10	10
				Triwulan IV	10	10
		6. Pembayaran PBB P2 Panutan	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10
		7. Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2 5 Kec	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10
		8. Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2 29 Desa	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penagihan Pajak Daerah	Rp. 8.966.581.000	

Kepala Bidang



Kusniati, SE, MM
 Pembina IV/a
 NIP 196602071993022001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penagihan Bidang Penagihan dan Pengembangan



Safrita Harya Rekyani, SE, M.Acc
 Pembina IV/a
 NIP 197206211997032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anik Rohmatul Fudla, SE
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kusniati, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Kusniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 196602071993022001

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Anik Rohmatul Fudla, SE
Perata Tingkat I, III/d
NIP 198412052010012014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	"Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah"	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	10 25 75 100	10 25 75 100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 133.587.800	

Kepala Bidang



Kusniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 196602071993022001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Bidang Penagihan dan Pengembangan.



Anik Rohmatul Fudla, SE
Pemata Tingkat I, III/d
NIP 198412052010012014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Danang Mintoko, SE
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Bidang Penagihan dan Pengembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kusniati, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Danang Mintoko, SE
Penata Tingkat I III/d
NIP 197510201997031002

PIHAK KEDUA

Kusniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 196602071993022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 152.899.900	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 182.237.400	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 106.698.900	

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan



Kusniati, SE, MM
 Pembina IV/a
 NIP 196602071993022001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Bidang Penagihan dan Pengembang.

Danang Mintoko, SE
 Penata Tingkat I III/d
 NIP 197510201997031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Pembina Tingkat I, III/d
NIP. 19680301 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Bidang Anggaran

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Tingkat				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rencanan Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	7%	30%	58%	100%	Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh Dokumen Anggaran yang disusun dikalikan 100 persen

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.839.095.400,00.	

Kepala BKAD Kab. Sleman



Hani Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640531 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2023
Kepala Bidang Anggaran



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19680301 199203 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Hidayatno, S.ST
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sieman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA


Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19680301 199203 1 005

PIHAK PERTAMA


Agus Hidayatno, S.ST
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19830804 200602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

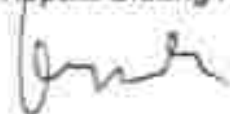
Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	1. Instruksi Anggaran	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
		2. Dokumen Anggaran yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
2.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1. Instruksi Anggaran Perubahan	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
		2. Dokumen RKA Perubahan yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1. DPA SKPD yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-

				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1.DPPA-SKPD yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	1.Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	100	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Perubahan	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 18.405.000,-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 18.405.000,-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 61.950.000,-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 37.323.000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Rp.1.481.815.200,-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 148.489.200,-	

Kepala Bidang Anggaran



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.19680301 199203 1 005

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan
 selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi
 Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran



Agus Hidayatno, S.ST
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.19630804 200602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Deni Ria Setiawati, SE, MM
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran, Bidang Anggaran.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Des. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Des. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19680301.199203 1 005

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Deni Ria Setiawati, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19730624 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

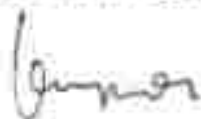
Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Analisis Standar Belanja	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	50	100
				Triwulan IV	-	-
		2. Penilaian Tunjangan Perumahan DPRD	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	25	25
				Triwulan IV	75	100
		3. Penilaian Tunjangan Transportasi DPRD	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	25	25
				Triwulan IV	75	100
		4. SHBJ 2024	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	75
				Triwulan III	25	100
				Triwulan IV	-	-
		5. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	50	50
				Triwulan IV	50	100

	6. Dokumen DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Pajak Rokok.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 50 75 100
--	---	-----	--	----------------------	-----------------------

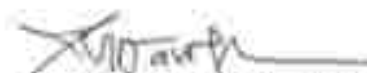
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 656.497.500	

Kepala Bidang Anggaran



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19680301 199203 1 005

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran



Deni Ria Setiawati, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP.19730624 199803 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Analisis Anggaran Bidang Anggaran.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19680301 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP.19720423 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

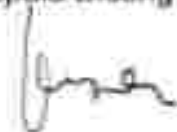
Kelompok Substansi Analisis Anggaran

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1. Dokumen KUA tahun 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
		2. Dokumen Minat, Permohonan Baseline, Permohonan Verifikasi, Permohonan Rekomendasi Pencairan, Laporan Triwulan dan Pengajuan Reimburse dana Hibah	100%	Triwulan I	25%	25%
				Triwulan II	0%	25%
				Triwulan III	55%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
		3. Dokumen PPAS 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Dokumen Perubahan KUA thn 2023	100%	Triwulan II	5%	5%
				Triwulan III	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
		2. Dokumen Perubahan PPAS 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%

	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Perkembangan Penyertaan Modal	100%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	40% 60% 70% 100%	40% 60% 70% 100%
--	--------------------------------------	---	------	--	---------------------------	---------------------------

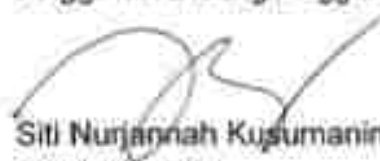
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 292.927.900,00	
2.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 218.429.600,00	
3.Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Rp. 67.540.000,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19680301 199203 1 005

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku
Sub-Koordinator Kelompok Substansi Analisis
Anggaran Bidang Anggaran



Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP.19720423 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Widodo, AP, MT

Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP 19770821 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Aset

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) level A.	-	-	-	86 %	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.418.686.800,00	

Sieman, 2 Januari 2023

Kepala BKAD Kab. Sieman


Hani Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Aset


Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP.19770821 199511 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 0001

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720218 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. RKBMD Pemerintah Kabupaten Sleman 2023	30	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Standar dan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. Pensertifikatan Tanah	50	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 774.206.000,00	

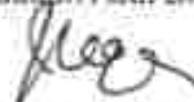
Kepala Bidang Aset



Widodo, AP. MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Sleman, 2 Januari 2023.

Pembina Pemerintah Ahli Muda pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-
Kepala Bidang Manajemen Sistem Perencanaan dan
Pengadaan Aset Bidang Aset



Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720218 200604 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Peratausahaan dan Pengendalian Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821-199511-1-001

PIHAK PERTAMA

Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19700304-199703-2-003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Laporan Penatausahaan BMD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	10 20 50 20	
2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1. Laporan Hasil Inventarisasi	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 20 20 35	
3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan BMD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 25 35	

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 375.186.000,00	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 1.504.061.800,00	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 587.206.000,00	

Kepala Bidang Aset



Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Slaman, 2 Januari 2023

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset Bidang Aset



Heri Margiyanti, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19700304 199703 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Kordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP.19770821,199511001

PIHAK PERTAMA

Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP.19810625 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Laporan Hasil Evaluasi	20	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Laporan Penyelesaian Barang Hilang	30	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. PAD dan Pemanfaatan BMD	30	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. SK Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 673.172.500	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 504.854.500	

Kepala Bidang Aset



Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Kordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Bidang Aset



Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19810625 199912 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina utama Muda, IV/c
NIP 19840831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP 19740709 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggung Jawaban APBD	-	-	100%	-	Raperda Pertanggung Jawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda Pertanggung Jawaban APBD dikalikan 100 persen

	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.1.208.070.250,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman



Haris Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Eko Yuliaty, SE, M.SE, M.Sc
 Pembina, IV/a
 NIP. 19740709 199903 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Suryanti, SE
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eko Yuliati, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Sri Suryanti, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19741227 199503 2 001

PIHAK KEDUA

Eko Yuliati, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19740709 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Laporan Keuangan Daerah	50	Triwulan I	40	80
				Triwulan II	50	100
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		2. LRA	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		3. Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	10	100
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		4. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	20	100
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
2	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Pengembangan Modul Sistem Keuangan	100	Triwulan I	40	40
				Triwulan II	60	60
				Triwulan III	70	70
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 787.147.850,00	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp. 254.839.400,00	

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19740709 199903 2 007

Slleman, 2 Januari 2023.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.



Sri Suryanti, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19741227 199503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wijayastari, SE, MM
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Eko Yulianti, SE, M, SE, M.Sc
Pembina. IV/a
NIP. 19740709 199903 2 007

PIHAK PERTAMA

Wijayastari, SE, MM
Pembina. IV/a
NIP. 19740722 199401 2 001

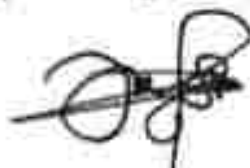
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Substansi Akuntansi dan Evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Penerimaan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Pembinaan Pengelola Keuangan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. SK Bendahara dan Perubahannya	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		4. Validasi Pendapatan dan Belanja SKPD	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Bimtek	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

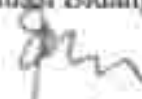
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp.83.733.000,00	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 82.350.000,00	

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Pembina. IV/a
NIP.19740709 199903 2 007

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan.



Wijayanti, SE, MM
Pembina. IV/a
NIP.19740722 199401 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fidyati, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19640631 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Nisa Fidyati, SE, M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19781010 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Perbendaharaan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam Penata Usahaan Keuangan Daerah	25 %	50 %	75 %	100 %	Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan dan Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah SP2D yang seharusnya diterbitkan dan Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dikalikan 100 %
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	25 %	50 %	70 %	90 %	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se DIY dibagi jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keistimewaan se DIY dikalikan 100%.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 978.794.724,00	
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	Rp. 83.312.000,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman


 Hari Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196408311993031006

Sleman, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Perbendaharaan


 Nisa Fidyati SE., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197810102006042018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Wahyu Arimindarko, SE
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok substansi Belanja Bidang Perbendaharaan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nisa Fidyati SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

PIHAK KEDUA


Nisa Fidyati SE., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 1978101 0200604 2 018


Agus Wahyu Arimindarko, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19650824 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Subbidang Belanja

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1. Dokumen Rekapitulasi Gaji PNS	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		2. Pencetakan Data Gaji PNS	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		3. Pencetakan Kesanggupan Bayar	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100
		4. Pencetakan Surat Keterangan Pemberhentian SKPP	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100
		5. Pencetakan Susulan Gaji, Kekurangan Gaji dan Terusan Gaji	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100
		6. Peremajaan Data Gaji	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100

2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Laporan Gaji Pegawai ke DPJK, PT Taspen, BPJS Kesehatan.	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		2. Laporan Rekonsiliasi Iuran IWP (Iuran Wajib Pegawai)	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		3. Pembinaan Pengelolaan Gaji	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		4. Sosialisasi Revisi Buku Pedoman Pengelolaan Gaji	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		5. Sosialisasi SPT Masa dan SPT Tahun PPH 2023	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp. 295.009.674	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 52.505.000	

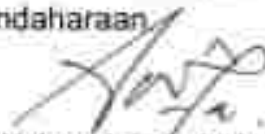
Kepala Bidang Perbendaharaan



Nisa Fidyati SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP.1978101 0200604 2 018

Sleman, 2 Januari 2023

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku sub-Koordinator Kelompok substansi Belanja Bidang Perbendaharaan



Agus Wahyu Arimandarko, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19650824 199203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Setyadi, SE, Ak
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Subtansi Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nisa Fidyati, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nisa Fidyati, SE, M.Si
Pembina IV/a
NIP 197810102006042018


Iwan Setyadi, SE, Ak
Penata Tingkat I III/d
NIP 198012142006041008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100

3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 88.911.000,00	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 171.549.150,00	
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Rp 122.319.900,00	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Rp 83.312.000,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan



Nisa Fidyati, SE, M.Si
Pembina IV/a
NIP 197810102006042018

Sleman, 2 Januari 2023

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Subtansi Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan



Iwan Setyadi, SE, Ak
Penata Tingkat I III/d
NIP 198012142006041008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sumali, SE.

Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Suroto, S.Sos

Jabatan : Kepala Subbag TU UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Sumali, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19690210 199003 1 00204

PIHAK PERTAMA

Suroto, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19750117 200604 1 004

Kepala TU UPTD Pengelola Stadion Maguwoharjo

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Kegiatan	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target PK
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	100 100 100 100

no	Program	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
			Sblm perubahan	Stlh perubahan	
1	2	3	4	5	6
	Program Pengelola Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.041.957.930,00		

Sleman, 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo



Sumali, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19690210 199003 1 007

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo



Suroto, S.Sos
Penata Tingkat I III/d
NIP 19750117 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dian Novita Yudo Saputro,SE.M.Acc
Jabatan : Kepala Subbagian TU UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sumali,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 1 Maret 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Sumali,SE
Penata Tingkat I,III/d
NIP.19690210 199003 1 007

Dian Novita Yudo Saputro,SE .M.Acc
Penata Tingkat I,III/d
NIP. 19791015 201001 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 50% 75% 100%	- - - 100%	

Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.3.041.957.930,00	

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion
Maguwoharjo



Sumali, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19690210 199003 1 007

Sleman, 1 Maret 2023

Kepala Subbag.TU UPTD Pengelola
Stadion Maguwoharjo



Dian Novita Yudo Saputro, SE, M.Acc
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19791015 201001 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640631 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19700607 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pemenuhan kebutuhan Adminstrasi perkantoran	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan Administrasi perkantoran yang terpenuhi di bagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100.

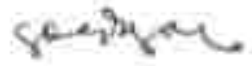
No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 960.000.000,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman


 Haris Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.196408311993031006

Sleman, 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal


 Ahmad Sudarsana, SE, Ak
 Penata Tingkat I, III d
 NIP.19700607 199703 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rumiwati, S.IP
Jabatan : Kepala Subbag TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 19700607 19970 3 1006

PIHAK PERTAMA

Rumiwati, S.IP
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 19701022 19920 3 2001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BKAD
 UPTD : Pengelolaan Dana Penguatan Modal
 Tahun Anggaran : 2023

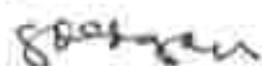
No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Berita Acara Verifikasi Dana Penguatan Modal	1,60	Triwulan I	0,25%	25%
				Triwulan II	0,50%	50%
				Triwulan III	1,20%	75%
				Triwulan IV	1,60%	100%
		2 Data Piutang Dana Penguatan Modal	16,30	Triwulan I	4,07%	20%
				Triwulan II	8,14%	40%
				Triwulan III	12,21%	90%
				Triwulan IV	16,30%	100%
		3 Forum Komunikasi DPM	16	Triwulan I	4%	25%
				Triwulan II	8%	50%
				Triwulan III	12%	75%
				Triwulan IV	16%	100%
		4 Laporan Keuangan Dana Penguatan Modal	1,7	Triwulan I	0,25%	25%
				Triwulan II	0,50%	50%
				Triwulan III	1,25%	75%
				Triwulan IV	1,70%	100%

		5. Laporan Monitoring DPM	2	Triwulan I	1,00%	25%
				Triwulan II	1,50%	50%
				Triwulan III	2,00%	75%
				Triwulan IV	3,00%	100%
		6. Laporan Penyelesaian Tunggakan Dana Penguatan Modal	4	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	0%	0%
				Triwulan IV	4%	100%
		7. Pelayanan Agunan dan Sewa Deposit (SDB)	3,30	Triwulan I	2,72%	25%
				Triwulan II	1,64%	50%
				Triwulan III	2,46%	75%
				Triwulan IV	3,30%	100%
		8. RBA UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	10,90	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	2,19%	50%
				Triwulan IV	10,90%	100%
		9 Sistem Informasi Dana Penguatan Modal	0,30	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	2,19%	50%
				Triwulan IV	10,90%	100%
		10. SK Penetapan Penerima dan Besaran Dana Penguatan Modal	10,40	Triwulan I	0%	20%
				Triwulan II	0%	40%
				Triwulan III	2,19%	60%
				Triwulan IV	10,90%	100%

		11 Sosialisasi Dana Penguatan Modal	13,80	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	0%	0%
				Triwulan IV	13,30%	100%
		12 Surat Perjanjian Pinjaman DPM	21,30	Triwulan I	4,75%	20%
				Triwulan II	9,50%	40%
				Triwulan III	15,99%	60%
				Triwulan IV	21,80%	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 960.000.000,00	

Kepala UPTD PDPM



Ahmad Sudarsana, SE, Ak
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.19700607 19970 3 1006

Kasubbagian TU UPTD PDPM



Rumiya, S.IP
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.19701022 19920 3 2001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eli Widiastuti SE, Ak

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19640631 199303 1 008

Sieman, 1 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

Eli Widiastuti, SE, Ak

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19710203 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Sekretaris BKAD

no	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penjanggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100
		PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	Prosentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran, Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja	25%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.

2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
---	-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	------	--

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 85.225.573.076,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 44.447.505.951,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.251.741.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.514.209.500,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.036.805.900,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.325.520.450,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 463.923.785.117,00

Kepala BKAD Kab Sleman

 Harjo Sutarto, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19640631 199303 1 006

Sleman, 1 Februari 2023.

Bekas BKAD Kab Sleman

 Eli Widiastuti, SE, Ak

Pembina Tingkat I, IVb

NIP.197102031997032002

Lampiran 1:

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Tanggal 05 Oktober 2023



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kustini Sri Purnomo
Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA

HARIS SUTARTA SE, MT
Pemimpin Utama Muda IV/c
NIP 196408311993031006

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala BKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	B	B	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	B	B	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah	-	-	-	81,50	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikan AKIP			A	A	Hasil penilaian Kementrian PAN dan RB

Program

Anggaran

Keterangan

- | Program | Anggaran | Keterangan |
|---|------------------------|------------|
| 1. Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | RP. 94.801.623.996,00 | |
| 2. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 486.784.575.678,00 | |
| 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 3.769.677.300,00 | |
| 4. Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. 15.819.107.675,00 | |
| 5. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelengkapan
Dan Ketatalaksanaan. | Rp. 83.312.000,00 | |

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman





PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eli Widiastuti SE, Ak.
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Eli Widiastuti, SE, Ak.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Sekretaris BKAD

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100

		PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosenase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran. Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja.	25%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu.	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yg disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yg disusun kali 100

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 70.073.995,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 39.447.508.951,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.200.291.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.997.221.100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 44.014.209.500,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.221.320.450,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 463.991.325.117,00

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah


Hani Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah


Eli Widiastuti SE, Ak
Pembina Tingkat I, IVb
NIP.19710203 199703 2 002



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Elli Widiastuti, SE, Ak
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Elli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

PIHAK PERTAMA

Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 1973110 4200501 2 005

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja Tahun n+1	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Dokumen Renja Perubahan Tahun n	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun n	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		4. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Dokumen RKA-SKPD Tahun n+1	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun n	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Dokumen DPA-SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun n	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Laporan Tahunan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2. Dokumen LKJLP/LAKIP	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

		3. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja (per Triwulan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		4. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		5. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja (per Triwulan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		6. Dokumen Laporan RFK (Form Sesuai Bagian Pembangunan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		7. Dokumen Laporan Bulanan (Form Sesuai Bagian Pemerintahan)	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.114.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.500,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	891.600,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.149.900,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.074.900,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.291.375,00	

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman



Eli Widiastuti, SE, Ak
Penata Tingkat I, IV/b
NIP. 19710710 199101 1 002

Sleman, 5 Oktober 2023

Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok
Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat



Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 19731104 200501 2 005



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eli Widiastuti, SE, Ak
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Eli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

PIHAK PERTAMA

Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 19720529 199803 2 007

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Subbagian Umum dan Kepegawaian

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Informasi Birokrasi	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Laporan Administrasi Kepegawaian	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. Pembayaran Tenaga non PNS/PHL	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

		2.Layanan kebersihan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. ATK 2. Layanan Makanan dan Minuman Rapat	100 100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100 25 50 75 100	25 50 75 100 25 50 75 100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Makanan dan Minuman Tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan penyedia sarana dan prasarana	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Gedung dan Taman	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan Surat Menyurat	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa langganan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
12	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	1. Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2. Layanan Kebersihan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

13	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Layanan Pemel. Kendaraan Dinas	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
		2. Layanan penyediaan BBM Kendaraan	100	Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
				Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100	Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
				Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
15	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100	Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Rp. 1.058.214.600,00	
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 89.798.000,00	
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 215.614.700,00	
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 841.014.800,00	
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 298.321.000,00	
6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 155.400.000,00	
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 532.379.720,00	
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 5.464.800.000,00	
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 2.362.770.000,00	
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 126.000.000,00	
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 43.574.560.000,00	
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 504.149.500,00	

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 533.300.000,00	
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 210.050.000,00	
15. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 473.470.450,00	

Sekretaris Badan



Elli yudiastuti, SE, Ak

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19710203 199703 2 002

Kastubagian Umum dan Kepegawaian



Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19720529 199803 2 007



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Misri Rusmiyati, SE, M.M

Jabatan : Kepala Subbidang Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eli Widiastuti, SE, Ak

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Eli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Misri Rusmiyati, SE, M.M
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720113 199208 2 001

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Keuangan Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		4. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		5. Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
		2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
		3. Tunjangan Pengelola BMD	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Dokumen Laporan Aset/BMD	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		2. Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	20	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	20	20
		3. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

		4. Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		5. Koordinasi Pengelola Keuangan BKAD	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 37.619.142.751,00	
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 609.900.000,00	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 66.463.200,00	

Sekretaris BKAD



Eli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, I/IVb
NIP. 19710203 199101 1 002

Kasubbagian Keuangan Sekretariat



Misri Rusmiyati, SE, M.M
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720113 199208 2 001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA


Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA


Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP.19690327 199803 1 002

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan Pajak Daerah.	-	-	-	70,67 %	Indeks kepuasan layanan Pajak yang diperoleh dari hasil survei terhadap Wajib Pajak Daerah;

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.795.154.675,00	

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman


 Haris Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan


 Rodentus Gondrosulistyo, SE, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19690327 199803 1 002



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Liliana Sukawati, ST, M.IDS, M.Ec.Dev.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sieman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP.19690327 199803 1 002

PIHAK PERTAMA

Liliana Sukawati, ST, M.IDS, M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP.1984051 7200903 2 012

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

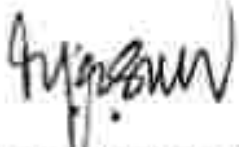
NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1. Verifikasi SPTD Pembinaan Per Wajib Pajak Secara Langsung	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25
2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1. Dokumen Pemeriksaan WP	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15 30 35 20	15 30 35 20

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 549.425.000
2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 2.268.801.375

Kepala Bidang


 Rodentus Condrosulistyo, SE. MM
 Pembina, IV/a
 NIP.19890327 199803 1 002

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada
 Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku
 Sub-Koordinator Kelompok Substansi
 Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan
 dan Penetapan


 Liliana Sukawati, ST, M.IDS, M. Ec. Dev.
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.19840517 200903 2 012



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ivhal Ilyas, S.Sos.,M.A.,M.Ec.Dev
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-
Koordinator Kelompok Substansi
Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
Pajak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327 199803 1 002

PIHAK PERTAMA

Ivhal Ilyas, S.Sos.,M.A.,M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19820531 201001 1 017

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1. Administrasi PBB	100	Triwulan I	15	15
				Triwulan II	31	31
				Triwulan III	28	28
				Triwulan IV	26	26
		2. Analisis Data PBB P2	100	Triwulan I	15	15
				Triwulan II	31	31
				Triwulan III	28	28
				Triwulan IV	26	26
		3. Cetak SPPT PBB P2	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		4. Pemantauan dan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB P2	100	Triwulan I	100	100
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-

		5. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		6. Pemutakhiran Data PBB	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		7. Penyampaian SPPT PBB yang Diterbitkan Massa	100	Triwulan I	29	29
				Triwulan II	37	37
				Triwulan III	32	32
				Triwulan IV	2	2
		8. Penyusunan SK Bupati Tentang NJOP PBB P2 2023	100	Triwulan I	100	100
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		9. SK NJOP	100	Triwulan I	30	30
				Triwulan II	38	38
				Triwulan III	19	19
				Triwulan IV	15	15

		10. Verifikasi SPPT PBB P2	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	29 37 32 2	29 37 32 2
2.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1. Laporan Data Wajib Pajak	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25,8 25,4 26,2 22,6	25,8 25,4 26,2 22,6
		2. Pelayanan Wajib Pajak	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25,3 27,6 30,3 16,8	25,3 27,6 30,3 16,8
		3. Wajib Pajak Baru	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	28,4 30,4 31,8 13,8	28,4 30,4 31,8 13,8

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 639.098.500,	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 794.956.800,00	

Kepala Bidang



Rodentus Gondrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327 199803 1 002

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator
Kelompok Substansi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan



Ivhal Iyaa, S.Sos., M.A., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 1982053.1 201001 1 017



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA


Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina.IV/a
NIP.19690327 199803 1 002

PIHAK PERTAMA


Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
Pembina.IV/a
NIP.197206151992032004

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Penetapan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

NO	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1. Penilaian PBB	10	Triwulan I	2	2
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	8	8
				Triwulan IV	10	10
		2. Laporan Hasil Penelitian Kantor dan Lapangan	10	Triwulan I	1	1
				Triwulan II	2	2
				Triwulan III	4	4
				Triwulan IV	5	5
		3. Tercapainya Target Penerimaan BPHTB	40	Triwulan I	10	10
				Triwulan II	20	20
				Triwulan III	30	30
				Triwulan IV	40	40
		4. Validasi SSPD BPHTB	40	Triwulan I	10	10
				Triwulan II	20	20
				Triwulan III	30	30
				Triwulan IV	40	40

2.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Surat Ketetapan Pajak Daerah	50	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. SPPT PBB P2	50	Triwulan I	97	97
				Triwulan II	1	1
				Triwulan III	1	1
				Triwulan IV	1	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.177.608.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 385.265.000	

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan


 Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
 Pembina, IV/a
 NIP.196903271996031002

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.


 Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP.197206151992032004



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kusniati, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Kusniati, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19660207 199302 2 001

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	31 %	31 %	31 %	31 %	Jumlah realisasi PAD tahun n dibagi jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n dikali 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 11.023.953.000,00	

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman


 Haris Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan


 Kusniati, SE, MM
 Pembina, IV/a
 NIP.19660207 199302 2 001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Safira Harya Rekyanti, SE, M.Acc
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penagihan Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kusniti, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kusniti, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 196602071993022001

PIHAK PERTAMA

Safira Harya Rekyanti, SE, M.Acc
Pembina IV/a
NIP. 197206211997032002

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Penagihan

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penagihan Pajak Daerah	1. Bahan Perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10
		2. Intensifikasi Penagihan PBB P2 di 86 Desa	10	Triwulan I	3	3
				Triwulan II	6	6
				Triwulan III	9	9
				Triwulan IV	10	10
		3. Laporan Perkembangan Piutang Pajak Daerah	10	Triwulan I	2.5	2.5
				Triwulan II	5	5
				Triwulan III	7.5	7.5
				Triwulan IV	10	10
		4. Laporan Realisasi Pajak Daerah	10	Triwulan I	2.5	2.5
				Triwulan II	5	5
				Triwulan III	7.5	7.5
				Triwulan IV	10	10
		5. Pemanggilan WP Daerah	10	Triwulan I	4	4
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	10	10
				Triwulan IV	10	10
		6. Pembayaran PBB P2 Panutan	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10
		7. Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2 5 Kec	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10
		8. Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2 29 Desa	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	4	4
				Triwulan III	7	7
				Triwulan IV	10	10

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penagihan Pajak Daerah	Rp. 10.546.581.000	

Kepala Bidang



Kusniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 196602071993022001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penagihan Bidang Penagihan dan Pengembangan



Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc
Pembina IV/a
NIP. 197206211997032002



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlandas tangan di bawah ini,

Nama : Anik Rohmatul Fudla, SE
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kusniati, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Kusniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 196602071993022001

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Anik Rohmatul Fudla, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP 198412052010012014

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	"Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah"	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	10 25 75 100	10 25 75 100
Sub Kegiatan			Anggaran		Keterangan	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Rp. 85.535.800			

Kepala Bidang



Kusniati, SE, MM

Pembina IV/a

NIP. 196602071993022001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Bidang Penagihan dan Pengembangan.



Anik Rohmatul Fodla, SE

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 198412052010012014



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Danang Mintoko, SE
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Bidang Penagihan dan Pengembang.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kusniati, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kusniati, SE, MM

Pembina IV/a

NIP. 196602071993022001

PIHAK PERTAMA

Danang Mintoko, SE

Penata Tingkat I III/d

NIP. 197510201997031002

**PERJANJIAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Rp. 102.899.900	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 182.237.400	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 106.698.900	

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan



Kusniati, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 196602071993022001

AKPD Ahli Muda pada BKAD dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan PAD Bidang Penagihan dan Pengembangan.



Damang Mintoko, SE
Penata Tingkat I III/d
NIP 197510201997031002



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19680301 199203 1 005

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Bidang Anggaran

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	7%	30%	58%	100%	Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh Dokumen Anggaran yang disusun dikalikan 100 persen

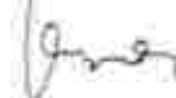
Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.420.911.100,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman



Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Anggaran



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19680301 199203 1 005



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Deni Ria Setiawati, SE, MM
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA


Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19680301.199203 1 005

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA


Deni Ria Setiawati, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19730624 199803 2 003

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

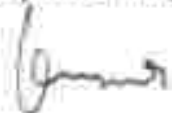
Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Analisis Standar Belanja	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	50	100
				Triwulan IV	-	-
		2. Penilaian Tunjangan Perumahan DPRD	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	25	25
				Triwulan IV	75	100
		3. Penilaian Tunjangan Transportasi DPRD	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	25	25
				Triwulan IV	75	100
		4. SHBJ 2024	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	75
				Triwulan III	25	100
				Triwulan IV	-	-
		5. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	50	50
				Triwulan IV	50	100

		6. Dokumen DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Pajak Rokok.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 50 75 100
--	--	---	-----	--	----------------------	-----------------------

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 574.418.500,00	

Kepala Bidang Anggaran

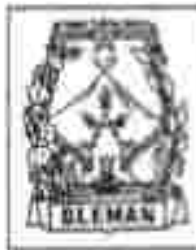


Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19680301 199203 1 005

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran



Deni Ria Setiawati, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP.19730624 199803 2 003



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Hidayatno, S.ST
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19880301 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

Agus Hidayatno, S.ST
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19830804 200602 1 001

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

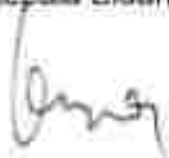
Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	1.Instruksi Anggaran	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
		2.Dokumen Anggaran yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
2.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1. Instruksi Anggaran Perubahan	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
		2.Dokumen RKA Perubahan yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1. DPA SKPD yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-

				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1.DPPA-SKPD yang diverifikasi	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	1.Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	100	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Perubahan	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	100	100
				Triwulan IV	-	-

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 12.405.000,00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 12.405.000,00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 38.520.000,00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 16.410.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Rp. 1.322.649.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 95.473.200,00	

Kepala Bidang



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19680301 199203 1 005

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku
 Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan
 Anggaran Bidang Anggaran



Agus Hidayatno, S.ST
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19830804 200602 1 001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Analisis Anggaran Bidang Anggaran.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sieman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19680301 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP.19720423 199503 2 002

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

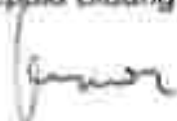
Kelompok Substansi Analisis Anggaran

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1. Dokumen KUA tahun 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
		2. Dokumen Minat, Permohonan Baseline, Permohonan Verifikasi, Permohonan Rekomendasi Pencairan, Laporan triwulan dan Pengajuan Reimburse dana hibah	100%	Triwulan I	25%	25%
				Triwulan II	0%	25%
				Triwulan III	55%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
		3. Dokumen PPAS 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Dokumen Perubahan KUA Tahun 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%
		2. Dokumen Perubahan PPAS 2023	100%	Triwulan I	5%	5%
				Triwulan II	25%	30%
				Triwulan III	50%	80%
				Triwulan IV	20%	100%

3.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1. Dokumen Laporan Perkembangan Penyertaan Modal	100%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	40% 60% 70% 100%	40% 60% 70% 100%
----	--------------------------------------	--	------	--	---------------------------	---------------------------

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 213.791.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 134.839.000,00	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Rp. 30.915.000,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan



Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19680301 199203 1 005

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dari Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Analisis Anggaran Bidang Anggaran.



Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 19720423 199503 2 002



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nisa Fidyati SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA


Haris Sutarta, SE, MT,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196408311993031006

PIHAK PERTAMA


Nisa Fidyati SE, M.Si
Pembina, IV/a
NIP.197610102006042018

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Bidang Perbendaharaan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam Penata Usahaan Keuangan Daerah	25 %	50 %	75 %	100 %	Jumlah Dokumen SP2D yang ditertibkan dari Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah SP2D yang seharusnya ditertibkan dan Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dikalikan 100 %
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	25 %	50 %	70 %	90 %	Jumlah Laporan hasil monitorin dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se DIY dibagi jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keistimewaan se DIY dikalikan 100%.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 697.097.724	
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	Rp. 83.312.000	

Kepala BKAD Kab. Sleman



Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196408311993031006

Kepala Bidang Perbendaharaan



Nisa Fidyati SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP 197810102006042018



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Setyadi, SE, Ak
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Subtansi Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nisa Fidyati, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



Nisa Fidyati, SE, M.Si
Pembina IV/a
NIP 197810102006042018

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



Iwan Setyadi, SE, Ak
Penata Tingkat I III/d
NIP 198012142006041008

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100

3.	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	80	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp87.291.000,00	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp147.149.156,00	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Rp85.638.900,00	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Rp83.312.000,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan

Slaman, 5 Oktober 2023

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan
selaku Sub-Koordinator Kelompok Subtansi
Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan



Iwan Setyadi, SE, Ak
Penata Tingkat I III/d
NIP. 198012142006041008



Nita Fidyati, SE, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197810102006042018



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA


Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA


Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Aset

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) level A	-	-	-	88 %	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.769.677.300,00	

Sieman, 5 Oktober 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman



Hafiz Sutarta, SE, MT
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19840831 199303 1 006

Kepala Bidang Aset



Widodo, AP, MT
 Pembina, IV/a
 NIP.19770821 199511 1 001



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 1972021 8200604 1 003

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset

NO	Sub- Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. RKBMD Pemerintah Kabupaten Sleman 2024	20	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	25	25
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Standar dan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	0	0
				Triwulan IV	100	100
		3. Pensertifikatan Tanah	50	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
3	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	1. Belanja Modal Peralatan Mesin	50	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	25	25
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

		2. Pengadaan Tanah	50	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	0	0
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 774.206.000 ,00	
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.008.800.000,00	
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.	Rp. 1.466.900.000,00	

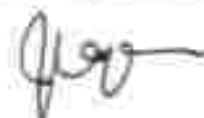
Kepala Bidang Aset



Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP.19770821 199511 1 001

Sieman, 5 Oktober 2023

Penilai Ahli Muda selaku Sub -Koordinator Kelompok
Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.



Dwi Nugroho ,SE,M,Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP.1972021 8200604 1 003



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Kordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Widodo, AP, MT
Pembina. IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc
Pembina. IV/a
NIP. 19810625 199912 1 001

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

NO	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Laporan Hasil Evaluasi	20	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Laporan Penyelesaian Barang Hilang	30	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. PAD dari Pemanfaatan BMD	30	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. SK Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 598.665.000,00	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 496.354.500,00	

Kepala Bidang Aset



Wisodo, AP, MT
Pembina. IV/a
NIP.19770821 199511 1 001

Sleman, 5 Oktober 2023

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Bidang Aset



Muh. Yunan Nurrianto, S.STP, M.Sc
Pembina. IV/a
NIP. 19810625.199912 1 001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19700304 199703 2 003

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan BMD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	10 20 50 20	-
2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 20 20 35	
3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan BMD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 25 35	

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 308.970.000,00	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 1.402.561.800,00	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 188.920.000,00	

Slendan, 5 Oktober 2023

Kepala Bidang Aset

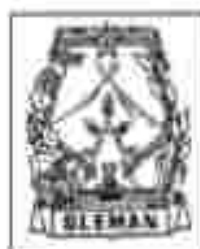


Wido, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset Bidang Aset



Horni Margiyanti, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19700304 199703 2 003



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eko Yuliaty, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sieman, 5 Oktober 2023.

PIHAK KEDUA


Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 008

PIHAK PERTAMA


Eko Yuliaty, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP.19740709 199903 2 007

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggung Jawaban APBD	-	-	100%	-	Raperda Pertanggung Jawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda Pertanggung Jawaban APBD dikalikan 100 persen

	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.643.498.250,00	

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman

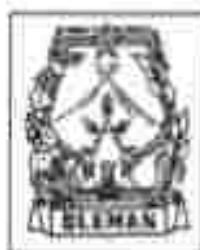


Harts Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Eko Yuliati, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19740709 199903 2 007



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Suryanti, SE
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Sri Suryanti, SE
Penata Tingkat I. III/d
NIP. 19741227 199503 2 001

PIHAK KEDUA

Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Pembina. IV/a
NIP. 19740709 199903 2 007

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Laporan Keuangan Daerah	50	Triwulan I	40	80
				Triwulan II	50	100
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		2. LRA	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		3. Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	10	100
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
		4. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	20	100
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	-	-
2	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Pengemibangan Modul Sistem Keuangan	100	Triwulan I	40	40
				Triwulan II	60	60
				Triwulan III	70	70
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 462.667.850,00	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp. 163.487.400,00	

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19740709 199903 2 007

Sleman, 5 Oktober 2023.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.



Sri Suryanti, SE
Pemita Tingkat I, III/d
NIP. 19741227 199503 2 001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wijayastri, SE, MM
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Subtansi Akuntansi dan Evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eko Yulati, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Eko Yulati, SE, M.SE, M.Sc
Pembina. IV/a
NIP. 19740709-199903 2 007

PIHAK PERTAMA

Wijayastri, SE, MM
Pembina. IV/a
NIP. 19740722-199401 2 001

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Substansi Akuntansi dan Evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Penerimaan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Pembinaan Pengelola Keuangan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. SK Bendahara dan Perubahannya	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		4. Validasi Pendapatan dan Belanja SKPD	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Bimtek	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp. 12.711.000,00	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 4.632.000,00	

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
 Pembina. IV/a
 NIP.19740709 199903 2 007

Sleman, 5 Oktober 2023.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku
 Sub-Koordinator Kelompok Substansi Akuntansi
 dan Evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan.



Wijayasari, SE, MM
 Pembina. IV/a
 NIP.19740722 199401 2 001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sumali,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta,SE.MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

HARIS SUTARTA, SE.MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Sumali,SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19690210 199003 1 007

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A	25%	50%	75%	100%	Jumlah OPD yang memiliki katagori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh opd dikalikan 100 %.

	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.651.457.930,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman


Hari Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640631 199303 1 006

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo


Sumali, SE
Penata Tingkat I, /III d
NIP.19690210 199003 1 007



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dian Novita Yudo Saputro,SE.M.Acc
Jabatan : Kepala Subbagian TU UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sumali,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Sumali,SE
Penata Tingkat I,III/d
NIP.19690210 199003 1 007

PIHAK PERTAMA

Dian Novita Yudo Saputro,SE.M.Acc
Penata Tingkat I,III/d
NIP. 19791015 201001 2 015

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 50% 75% 100%	- - - 100%	

Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.3.651.457.930.00	

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion
Maguwoharjo



Sumali, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19690210 199003 1 007

Kepala Subbag TU UPTD Pengelola
Stadion Maguwoharjo



Dian Novita Yudo Saputro, SE M.Acc
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19791015 201001 2 015



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA


Haris Sutarta SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA


Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19700607 199703 1 006

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100%

	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 960.000.000,00	

Kepala BKAD Kab. Sleman



Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

Sleman, 5 Oktober 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal



Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I, /III d
NIP.19700607 199703 1 006



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rumiwati, S.IP
Jabatan : Kepala Subbag TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 19700607 19970 3 1006

PIHAK PERTAMA

Rumiwati, S.IP
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 19701022 19920 3 2001

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BKAD
 UPTD : Pengelolaan Dana Penguatan Modal
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Berita Acara Verifikasi Dana Penguatan Modal	1,60	Triwulan I	0,25%	25%
				Triwulan II	0,50%	50%
				Triwulan III	1,20%	75%
				Triwulan IV	1,60%	100%
		2 Data Piutang Dana Penguatan Modal	16,30	Triwulan I	4,07%	20%
				Triwulan II	8,14%	40%
				Triwulan III	12,21%	90%
				Triwulan IV	16,30%	100%
		3 Forum Komunikasi DPM	16	Triwulan I	4%	25%
				Triwulan II	8%	50%
				Triwulan III	12%	75%
				Triwulan IV	16%	100%
		4 Laporan Keuangan Dana Penguatan Modal	1,7	Triwulan I	0,25%	25%
				Triwulan II	0,50%	50%
				Triwulan III	1,29%	75%
				Triwulan IV	1,70%	100%

		5. Laporan Monitoring DPM	2	Triwulan I	1,00%	25%
				Triwulan II	1,50%	50%
				Triwulan III	2,00%	75%
				Triwulan IV	3,00%	100%
		6. Laporan Penyelesaian Tunggakan Dana Penguatan Modal	4	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	0%	0%
				Triwulan IV	4%	100%
		7. Pelayanan Agunan dan Sewa Deposit (SDB)	3,30	Triwulan I	2,72%	25%
				Triwulan II	1,64%	50%
				Triwulan III	2,46%	75%
				Triwulan IV	3,30%	100%
		8. RBA UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	10,90	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	2,19%	50%
				Triwulan IV	10,90%	100%
		9 Sistem Informasi Dana Penguatan Modal	0,30	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	2,19%	50%
				Triwulan IV	10,90%	100%
		10. SK Penetapan Penerima dan Besaran Dana Penguatan Modal	10,40	Triwulan I	0%	20%
				Triwulan II	0%	40%
				Triwulan III	2,19%	60%
				Triwulan IV	10,90%	100%

		11 Sosialisasi Dana Penguatan Modal	13,80	Triwulan I	0%	0%
				Triwulan II	0%	0%
				Triwulan III	0%	0%
				Triwulan IV	13,30%	100%
		12 Surat Perjanjian Pinjaman DPM	21,30	Triwulan I	4,75%	20%
				Triwulan II	9,50%	40%
				Triwulan III	15,99%	60%
				Triwulan IV	21,80%	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 960.000.000,00	

Kepala UPTD PDPM



Ahmad Sudarsana, SE, Ak.
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19700607 19970 3 1006

Kasubbagian TU UPTD PDPM



Rumiya, S.IP
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19701022 19920 3 2001

Lampiran 1:

Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2023

Tanggal 27 Oktober 2023



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kustini Sri Purnomo
Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 27 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA

HARIS SUTARTA SE, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19540831 199303 1 006

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
2.		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50	-	81,50	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	-	-	A	A	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 95.417.623.996,00	
2	Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 491.221.944.074,00	
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.799.677.300,00	
4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 15.819.107.875,00	
5	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 55.900.500,00	

Sleman, 27 Oktober 2023

Bupati Sleman

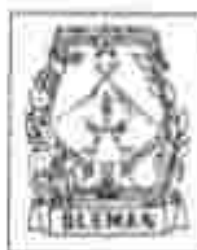


KUSTINI SRI PURNOMO

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



HARYS SUTARTA SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eli Widiastuti SE, Ak.
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 27 Oktober 2023

PIHAK KEDUA


Haris Sutarta, SE, MT,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 008

PIHAK PERTAMA


Eli Widiastuti, SE, Ak.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Sekretaris BKAD

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100

		PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Prosenase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran. Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja.	25%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah.	Prosentase Dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu.	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yg disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yg disusun kali 100.

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 54.284.275,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 38.307.505.951,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.058.214.600,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.132.519.220,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 44.204.709.500,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.216.820.450,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 493.875.142.074,00

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.


Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah


Eili Widiastuti SE, Ak
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19710203 199703 2 002



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nisa Fidyati SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nisa Fidyati SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Nisa Fidyati SE., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197810102006042018


Nisa Fidyati SE., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197810102006042018

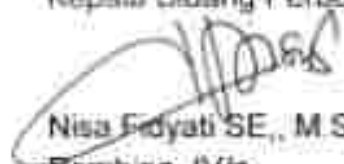
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

No	Nama Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1. Dokumen Rekapitulasi Gaji PNS	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		2. Pencetakan Data Gaji PNS	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		3. Pencetakan Kesanggupan Bayar	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100
		4. Pencetakan Surat Keterangan Pemberhentian SKPP	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100
		5. Pencetakan Susulan Gaji, Kekurangan Gaji dan Terusan Gaji	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100
		6. Peremajaan Data Gaji	15	Triwulan I	3,75	25
				Triwulan II	7,5	50
				Triwulan III	11,25	75
				Triwulan IV	15	100

2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Laporan Gaji Pegawai ke DPJK PT Taspen BPJS Kesehatan	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		2. Laporan Rekonsiliasi Iuran IWP (Iuran Wajib Pegawai)	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		3. Pembinaan Pengelolaan Gaji	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		4. Sosialisasi Revisi Buku Pedoman Pengelolaan Gaji	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100
		5. Sosialisasi SPT Masa dan SPT Tahun PPH 2023	20	Triwulan I	5	25
				Triwulan II	10	50
				Triwulan III	15	75
				Triwulan IV	20	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi, Pelaksanaan Kegiatan dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp. 295.884.574,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 46.130.000,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan



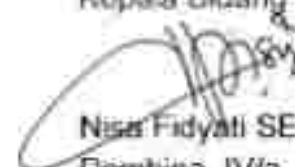
Nisa Fidyati SE., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 197810102006042018

Sleman, 27 Oktober 2023

Kepala Bidang Perbendaharaan



Nisa Fidyati SE., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 197810102006042018



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 27 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Bidang Aset

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) level A	-	-	-	86 %	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 12.243.247.300,00	

Sleman, 27 Oktober 2023

Kepala BKAD Kab. Sleman


Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640831 199303 1 006

Kepala Bidang Aset


Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP 19770821 199511 1 001



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset Bidang Aset.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 27 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 1972021 8200604 1 003

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset

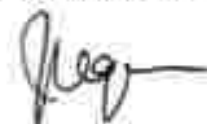
NO	Sub- Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. RKBMD Pemerintah Kabupaten Sleman 2024	20	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	25	25
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Standar dan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	0	0
				Triwulan IV	100	100
		3. Pensertifikatan Tanah	50	Triwulan I	20	20
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
3	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	1. Belanja Modal Peralatan Mesin	50	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	25	25
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

		2. Pengadaan Tanah	50	Triwulan I	0	0
				Triwulan II	0	0
				Triwulan III	0	0
				Triwulan IV	100	100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 774.206.000,00	
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 5.864.800.000,00	
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.	Rp. 2.578.770.000,00	

Slaman, 27 Oktober 2023

Penilai Ahli Muda selaku Sub -Koordinator Kelompok
Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.



Dwi Nugroho, SE, M. Ec. Dev
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 1972021 8200604 1 003

Kepala Bidang Aset



Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19770821 199511 1 001

Lampiran 2:

**Daftar Prestasi, beserta
dokumentasi piagam/sertifikat,
dan dokumentasi
seremonialnya**

LAMPIRAN 2

DATA PRESTASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

NO	PRESTASI	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama 12 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Opini WTP yang ke -12 diperoleh atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2023 tanggal 1 Maret 2023	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2	Peringkat 10 Nasional Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten cluster sedang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023	Kementerian Dalam Negeri